

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agenda pembangunan global yang dirumuskan oleh PBB melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) menetapkan integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai pilar utama menuju tahun 2030. Dalam kerangka ini, ekowisata sebagai salah satu bentuk pariwisata menempati posisi strategis karena kapasitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan (Abdullah & Saeed, 2025). Keterkaitan antara SDGs dengan pariwisata melalui berbagai kajian oleh Jackson (2025), Saputra (2025) dan Tohopi (2025) menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (SDGs 8), tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan (SDGs 1), penguatan komunitas lokal (SDGs 11), serta pelestarian lingkungan dan sumber daya alam (SDGs 15).

Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, ekowisata sebagai salah satu pendekatan pariwisata yang menekankan keseimbangan antara konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta manfaat ekonomi (Satria et al., 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Sabila (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan pendekatan SDGs dalam pengembangan ekowisata dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, menciptakan lapangan kerja lokal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ekowisata berkembang sebagai bagian penting dari strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat lokal

bukan sekadar sebagai objek wisata, melainkan sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan ekonomi destinasi. Kondisi ini tercermin melalui penelitian Putra & Intiar(2025) dan Cheryl(2025) yang menekankan bahwa keberlanjutan pengembangan wisata berbasis ekowisata sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat lokal yang didukung oleh penguatan kapasitas (*capacity building*) melalui kelembagaan komunitas yang adaptif, serta tata kelola kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, ekowisata sebagai pendekatan analitis untuk menganalisis tata kelola wisata alam berbasis masyarakat lokal.

Kota Semarang memiliki berbagai destinasi wisata alam yang tersebar di kawasan pesisir, hutan kota, dan wilayah berbasis lingkungan. Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik pariwisata perkotaan dengan tantangan urbanisasi, banjir rob, lingkungan pesisir, dan ketimpangan ekonomi masyarakat lokal(Ranti Astari Rahayu et al., 2024). Dalam konteks tersebut, ekowisata berbasis masyarakat lokal menjadi fenomena yang perlu dikaji untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, terdapat beragam destinasi wisata alam dengan karakteristik yang berbeda, mulai dari agrowisata, hingga kawasan konservasi *mangrove*. Adapun destinasi wisata alam sebagai berikut:

No	Data Wisata Alam	Objek Wisata	No	Data Wisata Alam	Objek Wisata
1.	Agrowisata Durian H Djahuri Mijen	Tutup Permanen	8.	Brown Cayon	
2.	Agrowisata Cepoko di Gunungpati		9.	Bumi Perkemahan Karanggeneng	
3.	Agrowisata Sikumbang di Gunungpati	Tidak ada data	10.	Curug Gondoriyo	
4.	Agrowisata Mangunsari di Gunungpati		11.	Dung Tungkul Meteseh	Tutup Permanen
5.	Agrowisata Kebun Durian Temu Kencono / Simbar Gunungpati		12.	Ekowisata Tapak Tugurejo	
6.	Agrowisata Purwosari Mijen		13.	Goa Kreo	
7.	Agrowisata Sodong	Tidak Aktif	14.	Hutan Tunjomoyo	
No	Data Wisata Alam	Objek Wisata	No	Data Wisata Alam	Objek Wisata
15.	Kampung Sleko Kota Lama		22.	Kebun UPTD Balai Benih dan Pembibitan Anggrek Dinas Pertanian	
16.	Kampung Wisata Taman Lele		23.	Konservasi <i>Mangrove</i> Trimulyo	Tidak Ada Data
17.	Kawasan Pantai Marina		24.	Konservasi <i>Mangrove</i> Terboyo Kulon	Tidak Ada Data
18.	Kawasan Tambak Lorok		25.	Lembah Ondorante	
19.	Kawasan Wisata Bahari Terboyo	Tidak Ada Data	26.	<i>Mangrove</i> EduPark	Tutup Permanen
20.	Kebun Buah Eyang Sri	Tidak Ada Data	27.	Pantai Mangunharjo	
21.	Kebun Karet Karyadeka Lestari	Tidak Ada Data	28.	Pantai Maron	
			29.	Pantai Tanjung Mas	Tidak Ada Data
			30.	Pantai Tirang	
			31.	Sendang Kaliancar	Tidak Aktif
			32.	Sungai Banjir Kanal Barat	
			33.	Wisata Mayangsari	Tidak Aktif
			34.	Wisata Tubing Kali Kranji	Tidak Aktif

Sumber : Diolah oleh Penulis(2026)

Gambar 1.1 Data Wisata Alam di Kota Semarang

Dari berbagai destinasi tersebut, Pantai Tirang dan Ekowisata *Ekowisata Mangrove Tapak Tugurejo* dipilih sebagai lokasi penelitian ekowisata perkotaan karena memiliki karakteristik konservasi lingkungan serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. Dalam penelitian ini, ekowisata dipahami sebagai pendekatan wisata yang mengintegrasikan pengalaman menikmati keindahan alam

dengan interaksi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat lokal, serta menekankan pada prinsip konservasi lingkungan dan edukasi(Dewi et al., 2021).

Berkaitan dengan pengelolaannya, permasalahan *capacity building* dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat lokal di Kota Semarang menunjukkan adanya hambatan yang bersifat multidimensional, meliputi aspek ekologis, sosial, kelembagaan, dan ekonomi. Kondisi ini tercermin pada kawasan pesisir yang memiliki tekanan lingkungan sekaligus potensi wisata yang besar(Alfirdaus et al., 2024).

Pada kawasan Pantai Tirang, abrasi hingga 17,14 meter per tahun menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya konservasi yang berkelanjutan. Kegiatan rehabilitasi *mangrove* tidak cukup hanya melalui penanaman, tetapi masih kurangnya penguatan kesadaran ekologis serta kapasitas masyarakat dalam pemeliharaan, monitoring, dan pengelolaan kawasan wisata. Selain itu, permasalahan pengelolaan lingkungan seperti sampah, perubahan garis pantai, dan tekanan terhadap daya dukung kawasan masyarakat lokal yang belum memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai(Alfirdaus et al., 2024; Hutapea et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan masih cenderung berfokus pada aspek fisik seperti kegiatan penanaman mangrove dan penyediaan sarana wisata, sementara penguatan kapasitas sumber daya manusia termasuk kemampuan manajerial, dan pemasaran belum optimal berbasis masyarakat lokal(Hutapea et al., 2023; Sekarwangi Putri Rinaryadi et al., 2025).

Isu permasalahan *capacity building* di Pantai Tirang juga diperkuat oleh penelitian Fauziningrum (2023) dan Muttaqin et al., (2023) yang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan lokal masih belum kuat. Permasalahan tersebut terlihat dari keterbatasan penyediaan infrastruktur dasar seperti pengelolaan listrik dan air bersih, serta belum optimalnya kerja sama antar internal dengan pihak swasta dalam pengembangan wisata. Pada Pantai Tirang juga dibutuhkan pengembangan kewirausahaan masyarakat lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang belum banyak terlibat dan memberikan manfaat ekonomi pada lingkungannya sendiri (Fauziningrum et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata tidak hanya menghadapi tantangan lingkungan, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang belum terintegrasi.

Sementara itu, pada kawasan Ekowisata *Ekowisata Mangrove Tapak Tugurejo*, merupakan kawasan konservasi pesisir seluas $\pm 15,05$ hektare yang memadukan fungsi ekologis dengan potensi wisata edukatif. Sebagai kategori destinasi wisata yang sedang berkembang, kawasan ini berkembang sebagai aktivitas konservasi seperti penanaman *mangrove* dan susur sungai (Kumparan.com, 2025). Upaya peningkatan kualitas manajemen dan fasilitas dilakukan melalui kolaborasi antara masyarakat dan akademisi (P3M STIEPARI, 2025). Penelitian oleh Trenggono (2024) menunjukkan masih adanya sejumlah dinamika dalam pengelolaan, antara lain keterbatasan koordinasi antara koordinator lapangan dan pengelola yang berdampak pada pelayanan wisatawan, ketiadaan papan informasi dan penanda lokasi pusat informasi, serta variasi tingkat partisipasi

masyarakat lokal, di mana sebagian aktif dan sebagian lainnya belum terlibat secara optimal.

Sejalan dengan itu, Ekowisata *Ekowisata Mangrove Tapak Tugurejo* melalui penelitian oleh Mirza et al., (2022) menyatakan permasalahan utama tidak hanya terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi juga pada belum optimalnya kapasitas pengelola dalam mengelola ekowisata secara profesional. Pengelola wisata yang tergabung dalam Pokdarwis umumnya belum memiliki kompetensi yang memadai dalam manajemen pariwisata pesisir, seperti perencanaan zonasi, pengelolaan daya dukung, manajemen kunjungan, serta penerapan standar keselamatan wisata. Selain itu, tantangan pada keterbatasan kapasitas dalam perencanaan bisnis, pemasaran paket wisata, kerja sama dengan biro perjalanan, serta pemanfaatan digital marketing yang belum optimal oleh pengelola wisata yang turut menghambat peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja lokal. Kondisi ini juga diperkuat oleh keterbatasan kemampuan dalam manajemen keuangan, penetapan tarif, pengelolaan retribusi, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan rantai nilai ekonomi wisata (Marcelliantika et al., 2025; Risyanti et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata berbasis masyarakat lokal masih menghadapi kesenjangan kapasitas, sehingga diperlukan *capacity building* yang lebih terarah.

Berdasarkan berbagai destinasi wisata alam di Kota Semarang, terdapat potensi alam dan sosial yang besar, namun masih menghadapi pengelolaan dengan berbagai keterbatasan. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia, kualitas fasilitas, serta pola kolaborasi antar pemangku kepentingan menunjukkan bahwa

keberhasilan ekowisata sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial dan kelembagaan pengelola. Namun, kajian secara menyeluruh membahas kemampuan manajerial, akses informasi, jaringan kemitraan, dan kemandirian pengelolaan wisata alam dengan pendekatan ekowisata di perkotaan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut sebagai dasar perumusan *capacity building* yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan beberapa program *capacity building*. Namun, melalui *website* Diskominfo Kota Semarang(2025) mempublikasikan program *capacity building* berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat dan UMKM, seperti pelatihan manajemen usaha, kewirausahaan, dan pemasaran digital. Pelatihan yang terpublikasi mengangkat tema ekowisata masih terbatas, salah satunya adalah Pelatihan Pemandu Ekowisata yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2020, yang bertujuan meningkatkan kompetensi pemandu lokal dan mengenalkan potensi wisata alam (Wahyu, 2020). Namun, setelah kegiatan tersebut, tidak ditemukan publikasi program pelatihan lanjutan setiap tahunnya yang secara rutin dan berkelanjutan difokuskan pada peningkatan kapasitas Pokdarwis atau masyarakat lokal. Selain itu, kegiatan pendampingan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas pengelolaan ekowisata juga dilakukan oleh perguruan tinggi, antara lain melalui pendampingan Desa Wisata Kandri dan UMKM pendukung ekowisata Tugurejo sebagaimana dikaji dalam penelitian Suminar(2025) dan Fakhria(2025). Berikut pemetaan beberapa kegiatan yang terpublikasi terkait *capacity building* di Kota Semarang.

Tabel 1.1 Program *Capacity building* dan Pendampingan Ekowisata di Kota Semarang

No	Jenis Program	Tahun	OPD/Pelaksana	Sasaran
1	Pelatihan Inkubasi UMKM	2025	Bappeda dan Diskominfo	UMKM
2	Pelatihan Pemandu Ekowisata	2020	Disbudpar Kota Semarang	Masyarakat/Pemandu
3	Pendampingan Desa Wisata Kandri	2024-2025	Perguruan Tinggi	Pokdarwis
4	Pendampingan UMKM Pendukung Ekowisata Tugurejo	2023-2024	Perguruan Tinggi	UMKM lokal

Sumber : Diolah oleh penulis(2026)

Dalam perspektif administrasi publik, pengelolaan wisata berbasis masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan penguatan kapasitas (*capacity building*). *Capacity building*, sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok dan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara efektif dan berkelanjutan(Devi & Rahaju, 2025; Hardian et al., 2025; Kia, 2021). *Capacity building* mencakup penguatan sumber daya manusia, kelembagaan lokal, serta kemampuan manajerial dan kolaboratif *multi-stakeholder* dalam pengelolaan sektor pembangunan(Margaretha, 2024).

Melalui penguatan konteks daerah, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015–2025 menjadi landasan pemerintah daerah dalam merancang, mengarahkan, dan melaksanakan kebijakan pembangunan sektor pariwisata secara terencana dan berkelanjutan. Peraturan ini terdapat pengembangan destinasi pariwisata berwawasan lingkungan, penguatan kelembagaan kepariwisataan, pening-

katan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, serta pemberdayaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata. Namun, beberapa penelitian menunjukkan masih adanya tantangan struktural dan kelembagaan dalam implementasi *capacity building* berbasis masyarakat lokal di Kota Semarang. Huttami(2025) menemukan bahwa kapasitas kelembagaan Pokdarwis masih lemah pada aspek manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia. Kusuma&Wahyudi(2023) menyoroti kurangnya koordinasi antaraktor dalam kerangka *collaborative governance*. Selain itu, Risyanti (2025) menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antaraktor pengelola menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekowisata Ekowisata Mangrove Tapak Tugurejo. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa *capacity building* yang diterima oleh Pokdarwis dalam dalam tata kelola ekowisata belum terbangun secara sistematis.

Dalam pengembangan pariwisata perkotaan, Antara News Jateng(2025) melaporkan bahwa Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menekankan perlunya peningkatan manajemen pengelolaan destinasi, promosi, dan pemasaran sebagai bagian dari pengembangan pariwisata lokal. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pengelola destinasi, termasuk pada kawasan ekowisata, masih menjadi kebutuhan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata daerah(Laeis, 2025). Sehubungan dengan itu, upaya digitalisasi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pengelolaan internal, khususnya terkait kualitas sumber daya manusia dan kapasitas administratif pengelola (Antara News,2025). Dalam dokumen resmi Paparan Pasar Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sema-

rang merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pelatihan secara rutin, serta peningkatan manajemen destinasi wisata. Rekomendasi tersebut menhindikasikan bahwa upaya *capacity building* yang ada masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.

Berbagai temuan penelitian pada destinasi ekowisata di Kota Semarang menunjukkan adanya perbedaan kondisi dalam hal kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat lokal, serta koordinasi antar pihak pengelola (Adi et al., 2022; Chriestian & Trenggono, 2024; Mahfuzh et al., 2022; Marcelliantika et al., 2025; Mirza et al., 2022). Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan ekowisata di Kota Semarang masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam mengintegrasikan peran masyarakat lokal secara lebih optimal. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana *capacity building* yang dijalankan oleh Pokdarwis Kota Semarang dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kelembagaan lokal, serta membangun koordinasi antar pemangku kepentingan dalam tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai mengapa *capacity building* Pokdarwis Kota Semarang berbasis masyarakat lokal belum optimal. Kajian ini difokuskan untuk menganalisis peran Pokdarwis dalam *capacity building* pengelolaan ekowisata. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan

penghambat, merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, serta memperkuat peran masyarakat lokal sebagai aktor dalam tata kelola ekowisata.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, beberapa permasalahan utama dalam tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal di Kota Semarang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penguatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata.
2. Kapasitas kelembagaan lokal dalam tata kelola ekowisata belum optimal.
3. Koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengelolaan ekowisata belum optimal.
4. Program *capacity building* belum terstruktur.
5. Partisipasi masyarakat lokal dalam tata kelola ekowisata belum merata.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *capacity building* Pokdarwis Kota Semarang dalam tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat *capacity building* Pokdarwis Kota Semarang dalam tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *capacity building* Pokdarwis Kota Semarang dalam Tata Kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *capacity building* Pokdarwis Kota Semarang dalam tata kelola ekowisata di berbasis masyarakat lokal.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal dan *capacity building* terhadap Pokdarwis Kota Semarang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pendekatan *capacity building* dalam pengelolaan pariwisata, peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, serta integrasi program pembangunan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi studi lanjutan yang meneliti hubungan antara kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan ekowisata.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah Kota Semarang, pembuat kebijakan, pengelola ekowisata, dan masyarakat lokal, untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola, meningkatkan koordinasi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan, mengopti-

malkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi, serta menyelaraskan pengelolaan ekowisata dengan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan

1.5.3 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai cara masyarakat mengelola ekowisata di tengah kota, khususnya di Kota Semarang. Hasil penelitian ini akan memberikan bukti nyata tentang pentingnya peningkatan kemampuan pengelola (*capacity building*), kerja sama antarpihak, serta penguatan organisasi lokal.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul>Nama Penu- lis/Jurnal	Teori	Metode	Hasil
1	Analisis Potensi Ekowisata di Taman Wisata Alam Gunung Pancar dengan Menggunakan Metode Analisis ADO – ODTWA (Ardiansyah & Iskandar, 2022) <i>Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 8, Januari 2022</i>	Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) dari Dirjen PHKA 2003	Pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan data sekunder	Hasil analisis ADO-ODTWA menunjukkan kawasan ini sangat potensial dan layak dikembangkan dengan indeks kelayakan 84,54%. Namun, pengelola perlu membenahi indikator yang masih berkriteria "sedang" seperti kondisi kawasan sekitar, akomodasi, daya dukung kawasan, dan pengaturan pengunjung.
2	Analisis Prospektif Strategi Pengembangan Ekowisata di Kawasan Pesisir Pantai (Mashur et al., 2022) <i>Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 13, No. 1, 2022</i>	Analisis Prospektif menurut Bourgeois dan Jesus (2004)	Penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive dan snowball sampling dengan 22 informan kunci	Hasil Penelitian mengidentifikasi empat faktor kunci untuk strategi pengembangan, yaitu penciptaan lapangan kerja (pemandu, kuliner, fotografer), peningkatan kunjungan melalui infrastruktur, promosi yang menasar target pasar spesifik, dan mitigasi abrasi melalui penanaman

No	Judul>Nama Penu- lis/Jurnal	Teori	Metode	Hasil
				<i>mangrove</i> serta pembangunan pemecah ombak
3	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Ekowisata di Kecamatan Batukliang Utara (Zaini et al., 2023) <i>Jurnal Ilmiah Global Education, Vol. 4, No. 1, 2023</i>	Teori Persepsi Masyarakat dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan	Penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap 3.005 responden	Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat sangat antusias (55,97%) dan setuju (47,97% sangat setuju) terhadap pengembangan ekowisata karena melimpahnya potensi alam seperti air terjun dan kerajinan tangan lokal.
4	Strategi <i>Capacity building</i> Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampung Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Damayanti et al., 2014) <i>Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3</i>	<i>Capacity building</i> menurut Merilee S. Grindle (Pengembangan SDM, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan)	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil analisis menyatakan Strategi "5758" (Maju Mapan) berhasil meningkatkan kapasitas SDM melalui sekolah satu atap dan pelatihan pemandu. Namun, peran Pemerintah Daerah dinilai masih pasif dalam dukungan finansial dan penyediaan prasarana, sehingga pengembangan belum mencapai sasaran maksimal.
5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Desa	Pemberdayaan Masyarakat (<i>People-centered development</i>) dan Ekowisata Berkelanjutan	Penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik <i>purposive sampling</i>	Hasil analisis pada penelitian menyatakan keberhasilan pemberdayaan terlihat melalui peran sentral Pokdarwis Pandanaran yang memicu perputaran ekonomi lokal.

No	Judul>Nama Penulis/Jurnal	Teori	Metode	Hasil
	Wisata Kandri, Kota Semarang (Inayah & Suminar, 2025) <i>Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, Vol. 5, No. 1, Maret 2025</i>			Namun, terdapat tantangan pada kepemilikan lahan (tanah bengkok pemerintah) yang dapat mengancam stabilitas investasi pariwisata di masa depan.
6	Pengelolaan Ekowisata dalam Perspektif <i>Collaborative Governance</i> untuk Mewujudkan Sustainable Tourism (Ngakan Made Dwika Sutadewa et al., 2025) <i>JHSP-Widyakarya, Vol. 3, No. 3, Juli 2025</i>	<i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell dan Gash (2008)	Pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif	Hasil analisis menyatakan kolaborasi lintas sektor (termasuk CSR Pertamina) berhasil menyelamatkan 10 hektare lahan dari alih fungsi melalui teknologi SIUMA. Namun, ditemukannya kesenjangan yaitu belum adanya kerangka hukum formal (visi-misi tertulis) dan strategi promosi yang masih terbatas pada lingkup lokal.
7	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekowisata di Ekowisata Nologaten.	parameter Kepemimpinan Fasilitatif dan pembangunan kepercayaan (trust building) dalam proses kolaboratif	Penelitian kualitatif	Hasil analisis pada penelitian menyatakan kolaborasi antar aktor berhasil mentransformasi bantaran sungai yang kumuh menjadi ruang publik produktif melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Hambatan utama yang menjadi tantangan tata kelola

No	Judul>Nama Penu- lis/Jurnal	Teori	Metode	Hasil
	(Lasampa & Ardiyati, 2025) <i>JPIKOM, Vol. 7, No. 1, 2025</i>			adalah rendahnya konsistensi masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang memerlukan adanya penguatan kapasitas struktural dari instansi pembina.
8	Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekowisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah. (Rahman & Hidayati, 2023) <i>Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol. 9, No. 2, 2023</i>	model Implementasi Kebijakan George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi).	Penelitian kualitatif	Hasil analisis pada penelitian menyatakan kebijakan yang diimplementasikan mampu memberikan kemakmuran warga melalui pengembangan industri UKM kopi dan bambu. Hambatan ditemukan pada lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi rutin dari dinas terkait, serta kesenjangan kompetensi SDM di level birokrasi yang masih didominasi lulusan menengah umum.
9	Kebijakan pengembangan <i>ecowisata</i> berbasis komunitas di Indonesia: sebuah pendekatan quadruple helix (Wirata et al., 2023)	Pendekatan Quadruple Helix yang menekankan interaksi antara pemerintah, universitas, industri, dan masyarakat	Penelitian Kualitatif	Hasil analisis pada penelitian menyatakan bahwa universitas memegang peran krusial dalam pendampingan ilmiah, sementara sektor industri berperan mendorong perekonomian. Namun, ditemukan masalah tumpang tindih kebijakan dan ego sektoral antar-kementerian yang menghambat optimal-

No	Judul>Nama Penu- lis/Jurnal	Teori	Metode	Hasil
	<i>JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), Vol. 9, No. 4, 2023</i>			isasi tata kelola ekowisata berbasis komunitas secara nasional.
10	Peran Administrasi Publik dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Indonesia Timur (Samboteng et al., 2024) <i>Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 11, No. 3, Desember 2024</i>	Teori Administrasi Publik(perencanaan, implementasi, dan pemantauan) dalam konteks Pariwisata Berkelanjutan dan regulasi zonasi	Pendekatan meta-naratif dengan mengevaluasi literatur akademis periode 2014-2024	Hasil penelitian menyatakan administrasi publik memiliki fungsi sentral dalam pembatasan jumlah pengunjung dan zonasi perlindungan sumber daya di wilayah sensitif. Namun penelitian ini menemukan adanya perbedaan kebijakan regulasi nasional dan daerah, serta lambatnya birokrasi dan isu integritas seperti korupsi yang menghambat efektivitas tata kelola pariwisata hijau di tingkat lokal
11	Kajian Potensi Pengembangan Ekowisata Kampung Pegat Batumbuk Kecamatan Pulau Dera- wan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Ti- mur (Ardiansyah et al., 2025)	Ekowisata berkelanjutan, ODTWA (Objek dan Daya Tarik Wisata Alam) Dirjen PHKA (2003), SWOT	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menyatakan Kampung Pegat Batumbuk memiliki potensi tinggi sebagai destinasi ekowisata berbasis <i>mangrove</i> dengan daya tarik utama berupa keanekaragaman flora dan fauna, aktivitas susur <i>mangrove</i> , serta kegiatan memancing. Keberadaan ekowisata ini berpotensi mendukung upaya konservasi ekosistem <i>mangrove</i> , meningkatkan perekonomian

No	Judul>Nama Penu- lis/Jurnal	Teori	Metode	Hasil
	<i>Jurnal Ulin – Jurnal Hu- tan Tropis</i> , Vol. 9 No. 2, 2025			masyarakat lokal, serta dimanfaatkan sebagai lokasi edukasi dan penelitian lingkungan.
12	Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Di Kota Semarang (Setiono et al., 2021) <i>PERSPEKTIF</i> , Vol. 10, No. 1, Januari 2021	Menggunakan model Pentahelix yang mensinergikan peran pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media	Pendekatan Kualitatif	Hasil analisis pada penelitian menya- takan pengelolaan pariwisata di kawa- san Kota Lama telah berhasil melibab- kan berbagai pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Namun terdapat beberapa kendala, yaitu kerentanan fisik destinasi terhadap bencana hidrometeor- ologi (banjir dan rob) serta ketidakpas- tihan status kepemilikan bangunan tua, yang memerlukan strategi pem- angunan kapasitas yang lebih adaptif dari sisi pemerintah.
13	<i>The Impact of Ecotourism Efficiency on Promoting Sustainable Tourism De- velopment in the North Central Region</i> (Thang & Khanh, 2025)	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui empat dimensi Wardana(2021): konservasi lingkungan, kualitas layanan, pembangunan ekonomi, serta infrastruktur dan pengendalian	Penelitian kualitatif untuk validasi skala pengukuran dan tahap kuantitatif menggunakan PLS-SEM terhadap 718 responden untuk menguji hubungan antar variabel	Hasil analisis pada penelitian menyatakan efisiensi ekowisata terbukti menjadi pendorong utama perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kinerja Ekowisata memiliki pengaruh terkuat terhadap Pengembangan Pariwisata

No	Judul>Nama Penu- lis/Jurnal	Teori	Metode	Hasil
	<i>Jurnal: Geojournal of Tourism and Geosites, Vol. 60, No. 2spl, Tahun 2025</i>			Berkelanjutan, dan kualitas ekowisata berperan sebagai pelengkap yang memperkuat hubungan tersebut.
14	<i>Stakeholder engagement in advancing sustainable ecotourism: an exploratory case study of Chilika Wetland</i> (Samal & Dash, 2024) <i>Discover Sustainability, Vol. 5, No. 50, Tahun 2024</i>	Penelitian ini menggunakan kerangka kerja DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response), pendekatan Triple Bottom Line (TBL), dan pendekatan Kolaboratif berorientasi komunitas (Co-C).	Studi kasus eksploratif dengan metode campuran; data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan diskusi dengan 42 pemangku kepentingan, sementara data sekunder berasal dari artikel jurnal dan laporan tahunan	Hasil penelitian menunjukkan potensi restorasi ekosistem melalui tata kelola ekowisata yang efektif, seperti kesuksesan komunitas Mangalajodi dalam mengubah pemburu menjadi pemandu konservasi. Namun, tantangan infrastruktur seperti listrik dan air serta rendahnya partisipasi perempuan masih menjadi hambatan dalam keterlibatan masyarakat jangka panjang.
15	<i>Forest-Based Ecotourism in Indonesia: A Comprehensive Review of Policy Challenges, Diverse Practices, Stakeholder Engagement, Conservation Efforts, and Socioeconomic Aspects</i> (Lawasi et al., 2025)	Sustainable Tourism, CBT, Model penta-helix	Metode yang digunakan adalah <i>Literature Review</i> / tinjauan pustaka sistematis dengan sumber data 71 artikel ilmiah dari Scopus dan <i>Google Scholar</i> (2014–2024)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekowisata berbasis hutan di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung konservasi sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Terdapat tiga pilar kebijakan utama yang berperan penting dalam keberhasilan ekowisata, yaitu tata kelola kolaboratif adaptif, penerapan skema insentif dan sertifikasi ramah lingkungan, serta penguatan edukasi lingkungan bagi wisatawan dan pengel-

No	Judul>Nama Penu- lis/Jurnal	Teori	Metode	Hasil
	<i>Geojournal of Tourism and Geosites, Vol. 60 No. 2, 2025</i>			ola. Ekowisata dinilai efektif sebagai instrumen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam upaya konservasi biodiversitas dan pengentasan kemiskinan.
16	<i>Does Ecotourism Really Benefit the Environment? A Trend Analysis of Forest Cover Loss in Indonesia</i> (Sisriany & Furuya, 2025) <i>Land, Vol. 14, No. 1237, 2025</i>	Analisis Kontrafaktual (<i>counterfactual analysis</i>) berbasis desain kuasi-eksperimental untuk membandingkan kondisi lokasi dengan intervensi ekowisata dan tanpa intervensi	Analisis spasial nasional menggunakan data penginderaan jauh (<i>remote sensing</i>) dan GIS (data tutupan hutan Hansen) periode 2014–2023. Tren dianalisis menggunakan uji Mann-Kendall dan Sen's Slope pada 152 lokasi ekowisata	Hasil penelitian menyatakan mayoritas lokasi ekowisata (69,08%) tidak menunjukkan pengurangan kehilangan hutan yang signifikan, bahkan beberapa lokasi mengalami percepatan deforestasi. Upaya konservasi hutan nasional secara umum lebih efektif dibandingkan inisiatif ekowisata lokal, kecuali di Kalimantan di mana lokasi ekowisata menunjukkan kinerja lebih baik dalam memitigasi kehilangan hutan dibandingkan lokasi non-ekowisata.
17	<i>From digital tools to sustainable outcomes: Empowering human resources for ecotourism development in Indonesia</i> (Rismayadi et al., 2026)	Digital Civics, Connectivity Theory, Capability Approach (Amartya Sen), Social Exchange Theory (SET), dan Community-Based Tourism (CBT)	Metode kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dari 323 responden di sektor ekowisata Bandung	Hasil penelitian memaparkan bahwa platform digital secara signifikan meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Pemberdayaan ini berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan platform digital dengan hasil keberlanjutan, pendidikan ekowisata, dan konservasi alam.

No	Judul>Nama Penu- lis/Jurnal	Teori	Metode	Hasil
	<i>European Journal of Sustainable Development Research</i> , 2026			Penelitian ini menekankan bahwa investasi teknologi harus diiringi dengan inisiatif peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar mereka memiliki kemandirian dalam mengelola ekowisata.
18	<i>Ecotourism governance and protected areas sustainability in Cameroon: The case of Campo Ma'an National Park</i> (Forge & Tchamba, 2022) <i>Current Research in Environmental Sustainability</i> , Vol. 4, 2022	kerangka kerja PROFOR/FAO Governance Assessment Framework yang menilai enam prinsip tata kelola: akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan/ekuitas, partisipasi, dan transparansi	Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan sumber data primer dari survei rumah tangga (124 responden) dan wawancara informan kunci (16 orang) di 9 komunitas sekitar taman nasional	Hasil penelitian menunjukkan belum adanya kebijakan nasional yang jelas terkait pengembangan ekowisata di kawasan lindung di Kamerun. Indikator tata kelola, dalam aspek pembagian manfaat dan keadilan, dinilai berada pada kategori sangat rendah, sementara tingkat partisipasi masyarakat berada pada level sedang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan terhadap mekanisme transparansi dan pengelolaan konflik agar pengembangan ekowisata dapat berkontribusi secara nyata terhadap konservasi keanekaragaman hayati serta peningkatan mata pencaharian masyarakat lokal.
19	<i>Sustainable Development of Ecotourism as a Driver</i>	Butler (1999) Teori Pariwisata Perkelanjutan, Scheyvens	<i>Mixed Methods</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cagar Alam Kulun-Ata memiliki po-

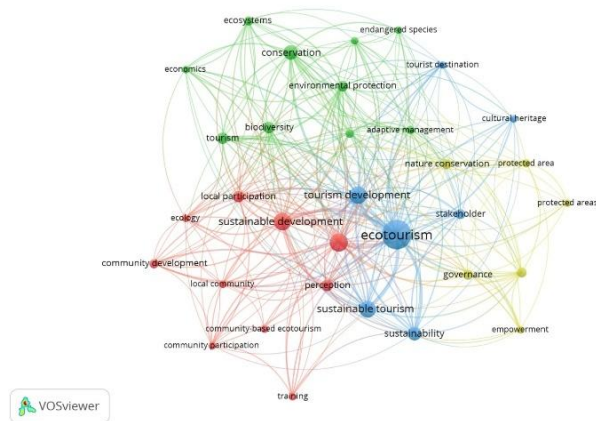
No	Judul>Nama Penu- lis/Jurnal	Teori	Metode	Hasil
	<i>of Local Development in the "Kulun-Ata" Nature Reserve, Kyrgyzstan: Perceptions of Local Communities</i> (NIZAMIEV et al., 2025) <i>Geojournal of Tourism and Geosites, Volume 63 No 4, 2025</i>	(1999) Community Based Eco-tourism.		tensi tinggi untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan yang didukung oleh keanekaragaman alam dan budaya lokal. Masyarakat sekitar menunjukkan persepsi positif dan kesiapan berpartisipasi, terutama pada aspek kesadaran lingkungan dan sosial-budaya. Namun, pengembangan ekowisata masih menghadapi kendala berupa rendahnya kepercayaan kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, serta kapasitas ekonomi masyarakat yang terbatas.
20	<i>Ecotourism Development in Bangka Islands: An Exploratory Study on Participation and Expectations of Local Stakeholders</i> (Ibrahim et al., 2020) <i>Journal of Physics: Conference Series</i>	Menggunakan konsep pengembangan pariwisata partisipatif dan aliansi strategis antar pemangku kepentingan	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap 30 responden yang mewakili berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, bisnis, kelompok sadar wisata, media, dan pendidik) serta observasi lapangan	Hasil penelitian menyatakan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan sudah mulai berkembang namun belum optimal karena masing-masing pihak masih bekerja secara terpisah. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi pengembangan ekowisata yang belum merata antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta akses transportasi yang masih minim sehingga menghambat pergerakan wisatawan.

Sumber : Diolah oleh penulis(2026)

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi kajian penelitian sejenis, terdapat kajian pada lingkup global maupun nasional. Sebagian besar penelitian nasional menyoroti pengembangan ekowisata melalui aspek potensi sumber daya alam, strategi pengembangan destinasi, partisipasi masyarakat lokal, penguatan kelembagaan lokal yaitu Pokdarwis, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kajian-kajian tersebut umumnya menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, promosi destinasi, serta tata kelola berbasis komunitas. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek operasional dan hasil program di lingkungan desa wisata atau kawasan khusus ekowisata, sementara kajian secara spesifik mengenai *capacity building* Pokdarwis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan lokal, serta tata kolaboratif ekowisata perkotaan masih relatif terbatas.

Dalam lingkup literatur global, penelitian lebih banyak berkembang pada isu tata kelola ekowisata berkelanjutan, penguatan kelembagaan, *collaborative governance*, integrasi kebijakan lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan destinasi. Kajian literatur global umumnya belum spesifik menganalisis konteks ekowisata di perkotaan di negara berkembang yang dihadapkan dengan kompleksitas aktor, tekanan urbanisasi, serta ketimpangan sosial ekonomi masyarakat lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya celah kajian terkait bagaimana *capacity building* perkotaan dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk mendukung keberlangsungan ekowisata berbasis masyarakat lokal.

Selain melalui analisis penelitian terdahulu, penelitian ini dilengkapi dengan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer sebagai alat pemetaan tema dan penentuan posisi penelitian. Terdapat *co-occurrence analysis* berdasarkan data *Scopus* periode 2000-2026 untuk melihat visualisasi jaringan yang menggambarkan hubungan antar konsep dan perkembangan tema penelitian secara sistematis. Data diperoleh dari database *Scopus* pada 23 Februari 2026 menggunakan kombinasi kata kunci. Kata kunci yang digunakan yaitu ("*capacity building*" OR "*capacity development*") AND ("*ecotourism*" OR "*green tourism*").



Sumber : Hasil analisis *VOSviewer*(2026)

Gambar 1.2
Co-Occurance Analysis VOSviewer

Hasil visualisasi bibliometrik menunjukkan kata kunci *ecotourism* berada pada posisi sentral dan terhubung kuat dengan kluster *local participation*, *community development*, *training*, *governance*, *empowerment*, *sustainability*, serta *conservation*. Keterhubungan ini memperlihatkan bahwa pembahasan akademik mengenai ekowisata tidak hanya berdiri pada aspek pariwisata, namun telah berkembang menjadi multidimensi yang menempatkan masyarakat lokal, tata kelola, dan keberlanjutan lingkungan sebagai elemen utama. Kemunculan kata *train-*

ing, community participation, dan local community dalam satu klaster yang sama menunjukkan bahwa literatur global mulai menekankan pentingnya proses penguatan kapasitas masyarakat sebagai syarat utama keberhasilan ekowisata yang berbasis pada komunitas.

Selain itu, hubungan kuat antara kata *governance, empowerment, dan protected area* menandakan adanya perhatian akademik terhadap peran otoritas atau pemerintah dalam mengatur, memfasilitasi, sekaligus memberdayakan masyarakat saat pengelolaan daerah ekowisata. Hal ini menandakan, upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam ekowisata tidak bisa dipisahkan dari rencana pengelolaan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Sementara itu, keterkaitan antara kelompok kata *conservation, biodiversity dan environmental protection* mempertegas bahwa tujuan utama ekowisata yang melibatkan masyarakat adalah melindungi alam melalui partisipasi aktif warga setempat yang sudah diberi pelatihan dan dukungan untuk lebih kuat.

Berdasarkan tinjauan terhadap literatur nasional, global, dan hasil visualisasi *VOSviewer* tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kajian ekowisata telah berkembang luas, sebagian besar penelitian membahas aspek partisipasi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, tata kelola kolaboratif dan pengembangan pariwisata. Penelitian ini akan menghubungkan *capacity building* pemerintah kota, penguatan masyarakat lokal dan tata kelola ekowisata perkotaan dalam satu kerangka analisis yang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis untuk mengisi celah penelitian dengan menganalisis secara mendalam bagaimana Pokdarwis pada ekowisata perkotaan menerapkan *capacity*

building untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan lokal, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola ekowisata yang berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap *capacity building* dalam pengelolaan ekowisata perkotaan (*urban ecotourism*) di Kota Semarang, yang memiliki karakter dan tantangan berbeda dibandingkan ekowisata di wilayah perdesaan maupun desa wisata. Sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti ekowisata di kawasan pegunungan, hutan lindung, atau daerah dengan basis potensi alam. Sebaliknya, penelitian ini akan menyoroti kondisi khas Kota Semarang, seperti tingginya tekanan urbanisasi, permasalahan kawasan pesisir akibat banjir dan rob, serta keberadaan kampung tematik yang berada di tengah kawasan perkotaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur dengan menghadirkan perspektif *urban ecotourism* yang dipadukan dengan *capacity building* Pokdarwis perkotaan dalam kerangka tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Kasim(1993) dalam Hapsari et al., (2024) merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan yang mencakup proses, organisasi, dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam implementasi peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan peradilan. Dalam pandangan ini, administrasi publik secara implisit terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik, mulai dari perumusan hingga implementasi. Namun, pandangan ini tidak selalu konsisten. Ellwein, Hesse, dan Peter dalam Hapsari et al., (2024) menyatakan keyakinan bahwa administrasi publik kurang memiliki fleksibilitas dan kebijaksanaan relatif dalam memberlakukan undang-undang. Mereka lebih melihat administrasi publik sebagai alat untuk menerapkan hukum daripada sebagai sarana merumuskan kebijakan baru.

Henry (1989) dalam Hapsari et al., (2024) menggambarkan administrasi publik sebagai sinergi antara teori dan praktik birokrasi publik, sementara Hughes (1994) menekankan pada peran pegawai negeri dalam melayani publik dan menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Administrasi publik merupakan bidang studi dan praktik yang berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah (Hapsari et al., 2024). Bidang ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat serta mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik melibatkan kajian tentang teori dan praktik yang

berkaitan dengan pengelolaan organisasi publik, interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan (Khairunnas & Nadjib, 2024)

Menurut Joko Sutanto 2020, administrasi publik berperan penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui pelayanan publik yang efektif. Ruang lingkup administrasi publik sangat luas, mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Dalam konteks ini, administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan kegiatan internal pemerintahan, tetapi juga interaksi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Administrasi publik juga berfokus pada inovasi dan efisiensi dalam penyampaian layanan kepada masyarakat, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan (Yusuf & Kismartini, 2023).

Menurut Chandler dan Plano 1988 administrasi publik adalah sebuah proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya organisasi publik dalam rangka formulasi, implementasi dan mengelola hasil kebijakan publik (Yusuf & Kismartini, 2023). Felix A. dan Lloyd Nigro 1984 juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah, swasta maupun perseorangan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Administrasi publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik dengan melakukan perbaikan pada segala aspek baik aspek organisasi, aspek sumber daya manusia maupun aspek keuangan (Yusuf & Kismartini, 2023).

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, administrasi publik adalah kegiatan pemerintah yang mengatur, mengelola, dan melaksanakan kebijakan serta layanan publik menggunakan sumber daya yang ada dengan tujuan utama melayani masyarakat dan menciptakan kesejahteraan umum melalui penerapan hukum yang ada.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Ilmu administrasi Publik mengalami perkembangan yang sangat pesat, terlebih di negara maju. Menurut Pasolong 2016 dalam (Supriyadi, 2021) perubahan dan perkembangan suatu ilmu pada dasarnya dapat ditelusuri melalui perjalanan perubahan paradigmanya. Paradigma merupakan pola pikir dalam suatu disiplin ilmu yang menentukan apa saja yang menjadi inti persoalan yang seharusnya dikaji oleh cabang ilmu tersebut. Dalam konteks administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial, perkembangan paradigma ini terus berlangsung seiring dengan dinamika zaman. Perubahan tersebut dapat diamati melalui perkembangan teori, cara pandang, model analisis, arah pemikiran, serta metode yang digunakan (Rodiyah et al., 2021).

Thomas S. Kuhn dalam (Rodiyah et al., 2021) memandang paradigma sebagai seperangkat nilai, metode, prinsip dasar, atau pendekatan dalam memecahkan masalah yang dianut oleh komunitas ilmiah pada periode tertentu. Menurut Thomas Khun, dalam paradigma akan mengalami tahap pergeseran untuk semua disiplin ilmu, baik eksakta maupun sosial (Supriyadi, 2021). Sementara itu, Nicholas Henry menegaskan bahwa paradigma administrasi publik sangat penting karena membantu seseorang memahami posisi dan batas-batas kajian administrasi publik.

Secara historis, administrasi publik telah berkembang sebagai disiplin akademik melalui lima paradigma yang saling bertumpukan, di mana setiap paradigma memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan lokus dan fokusnya. Lokus mengacu pada ruang atau wilayah tempat aktivitas administrasi publik berlangsung, yang umumnya berada dalam birokrasi pemerintahan. Fokus merujuk pada aspek atau kekhususan yang menjadi perhatian utama disiplin ini, yang terus mengalami perubahan seiring dengan bergesernya paradigma administrasi publik.

Berikut merupakan lima paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry (Rodiyah et al., 2021; Yusuf & Kismartini, 2023) :

1. Paradigma I : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini berawal dari pemikiran Frank J. Goodnow (1900) yang membedakan fungsi politik dan administrasi. Politik berperan dalam merumuskan kebijakan, sedangkan administrasi bertugas melaksanakan kebijakan. Paradigma ini menempatkan administrasi publik dalam birokrasi pemerintahan dan melahirkan konsep dikotomi politik-administrasi. Pada masa ini administrasi publik mulai berkembang sebagai bidang akademik, meskipun masih dianggap bagian dari ilmu politik. Pengakuan penting terhadap administrasi publik ditandai dengan terbitnya buku *Introduction to the Study of Public Administration* karya Leonard D. White pada tahun 1926. Secara umum, Paradigma I menegaskan pemisahan antara fungsi politik sebagai pembuat kebijakan dan administrasi se-

bagai pelaksana kebijakan, dengan fokus utama pada birokrasi pemerintah sebagai lokus administrasi publik.

2. Paradigma II : Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Paradigma ini berkembang setelah W.F. Willoughby menerbitkan *Principles of Public Administration* (1927), yang menegaskan bahwa administrasi publik memiliki prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan di mana saja. Pada periode ini, administrasi publik berkembang pesat dan mendapat pengakuan luas karena para ahli administrasi diterima luas oleh pemerintah dan dunia industri pada tahun 1930–1940-an.

Fokus utama paradigma ini bukan lagi pada “di mana administrasi diterapkan”, tetapi pada prinsip-prinsip administrasi itu sendiri. Lokus administrasi dianggap berlaku di semua jenis organisasi, karena prinsip administrasi berlaku universal. Pemikiran ini diperkuat oleh karya-karya tokoh seperti Mary Parker Follett, Henri Fayol, Mooney & Reiley, dan terutama Gulick & Urwick yang memperkenalkan konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*).

Secara keseluruhan, Paradigma II menegaskan bahwa administrasi publik berfokus pada keahlian teknis melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen yang bersifat universal, tanpa bergantung pada jenis organisasi, budaya atau lingkungan.

3. Paradigma III : Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada periode ini, administrasi publik mengalami kritik tajam terutama dari Herbert Simon yang menggugat pemisahan politik administrasi serta prinsip-prinsip administrasi yang dianggap tidak konsisten. Akibatnya, administrasi publik kembali dipandang sebagai bagian dari ilmu politik. Lokus administrasi publik kembali diarahkan pada birokrasi pemerintahan, namun fokus keilmuannya menjadi tidak jelas.

Pada 1950–1960-an, administrasi publik semakin melebur dengan ilmu politik sehingga eksistensinya sebagai disiplin mandiri melemah. Administrasi publik bahkan tidak lagi diakui sebagai subdisiplin utama dalam asosiasi ilmu politik Amerika. Namun, pada era ini berkembang metode studi kasus dipelopori sejak 1930-an dan diperkokoh pada 1951 yang membantu administrasi publik menganalisis dan mempelajari masalah-masalah administrasi secara nyata.

4. Paradigma IV : Administrasi negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma IV memandang administrasi negara sebagai ilmu administrasi atau ilmu manajemen yang menekankan efisiensi dan efektivitas organisasi. Paradigma ini muncul sebagai reaksi terhadap pandangan yang menganggap administrasi publik kembali menjadi bagian dari ilmu politik. Fokus utama pada masa ini terletak pada keahlian manajerial dan teori

organisasi, bukan pada tempat penerapannya (lokus). Perkembangannya dipengaruhi oleh tokoh seperti Herbert Simon, Richard Cyert, dan James Thompson, serta menggunakan pendekatan psikologi dan perilaku organisasi untuk memahami proses kerja dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Namun, paradigma ini belum mampu menjelaskan secara jelas perbedaan administrasi publik dan administrasi privat, sehingga persoalan mengenai makna “publik” dan lokus administrasi publik masih menjadi perdebatan.

5. Paradigma V : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990)

Pada paradigma ini menekankan kejelasan fokus yaitu, kebijakan publik, teori manajemen, teori organisasi dan lokusnya yaitu masalah-masalah dan berbagai kepentingan publik.

6. Paradigma *Governance* (1990-sekarang)

Pada paradigma ini terdapat suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan serta kepentingan mengenai sektor ekonomi, sosial, dan politik melalui interaksi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan paradigma di atas, paradigma yang sesuai dengan fokus penelitian ini adalah paradigma V, karena memiliki fokus yang relevan dengan penelitian ini, yaitu pada fokus kajian manajemen publik berkaitan dengan teori organisasi. Penggunaan paradigma ini sesuai dengan kerangka analitis bagi peneliti untuk mengkaji *capacity building* sebagai instrumen manajemen publik dalam men-

gorganisasikan sumber daya untuk mewujudkan tata kelola ekowisata berbasis masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

1.6.4 Manajemen Publik

Menurut Manulang dalam (Firdausijah et al., 2023) mendefinsikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selaras dengan definisi Stoner dan Freeman dalam (Firdausijah et al., 2023) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. G.R Terry dalam (Firdausijah et al., 2023) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pengertian manajemen berbeda dengan administrasi. Administrasti berarti mengikuti instruksi dan manajemen berarti pencapaian hasil.

Manajemen publik menurut Shafritz dan Russel diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut donovan dan jackson manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan. Menurut Overman (1984) manajemen publik adalah sebuah penelitian interdisipliner dalam organisasi dan merupakan perpaduan

dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian fungsi manajemen(Firdausijah et al., 2023).

Manajemen publik, mengacu pada buku yang ditulis oleh Thomas Woodrow Wilson dalam (Firdausijah et al., 2023) pada tahun 1887 berjudul “*The Study of Administration*” meletakkan empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang , yaitu: (1) Pemerintah sebagai setting utama organisasi; (2) Fungsi eksekutif sebagai fokus utama; (3) Dimana pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi; serta (4) Metode perbandingan sebagai suatu metode pengembangan bidang administrasi publik.

Menurut Satibi(2023) konsep manajemen publik menunjukkan peran penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sektor publik. Kehadiran manajemen publik diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen publik menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas pengelolaan berbagai sektor publik. Terdapat prinsip dasar yang melandasi efektivitas pelaksanaan manajemen publik. Adapun prinsip-prinsip dasar, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabel, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan program yang telah dicanangkan.

2. *Transparan*, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses serta di kontrol oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk oleh masyarakat secara umum.
3. *Responsive*, mengandung arti bahwa sejauhmana pengelolaan manajemen publik mampu menangkap pesan dan harapan publik, sehingga *output* yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. *Efektif*, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik harus memperhatikan prinsip efektivitas yang tercermin dari pencapaian target atau sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.
5. *Efisien*, mengandung arti bahwa sejauhmana pelaksanaan manajemen publik mampu melakukan penggunaan sumber daya organisasi yang dimiliki, khususnya sumber daya anggaran secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan.
6. *Adaptif*, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik sudah selayaknya mampu mengadaptasikan diri dengan pergeseran, perkembangan dan percepatan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem informasi.
7. *Rasional*, mengandung arti bahwa program dan pelaksanaan manajemen publik harus sistematis dan terukur, sehingga para aktor dengan mudah dapat memahami dan mengerti mengapa program atau kegiatan tersebut harus dilaksanakan.
8. *Profesional*, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik harus dilaksanakan oleh aparat atau para pelaksana yang memiliki kemampuan,

keahlian serta kompetensi yang memadai sesuai dengan program/ rencana yang telah ditetapkan. Sikap profesional ini akan tercermin dari kemampuan intelektual (kecerdasan), fisik (kekuatan secara fisik) serta kemampuan psikologis (kecerdasan emosional).

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah proses yang didalamnya terdapat cara atau usaha pemerintah mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan dan manfaat bagi kepentingan publik.

1.6.5 *Capacity Building*

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebagai suatu pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan yang muncul beriringan dengan pertumbuhan negara-negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika pada tahun 1980-an. Pada awalnya konsep pengembangan kapasitas ini lebih dikenal dengan sebutan “*institution building*” pada 1950-1960an dan bergeser menjadi “*institution strengthening*” pada tahun 1970-an dan berubah menjadi “*institutional development*” pada tahun 1980-an (LAN, 2000). Pemikiran yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas menurut Eade (1997) tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan konsep sebelumnya yang menyatakan dengan tiga komponen: (1) Penguatan organisasi dan manajemen; (2) Penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana; serta (3) Jaringan atau linkage (Nugraha et al., 2004).

Konsep pengembangan kapasitas (*capacity building*) menurut Yuwono (2003) merupakan upaya peningkatan kemampuan, keterampilan, kemampuan sangat di-

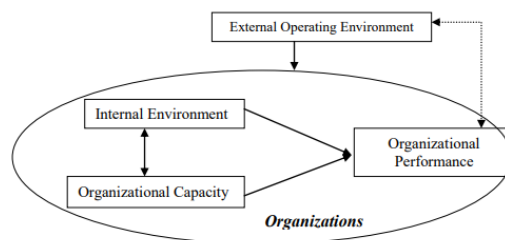
perluan untuk melaksanakan dan mengingat urgensinya dalam era otonomi daerah. Selaras dengan itu, Morison(2001) memandang *capacity building* sebagai suatu proses yang mencakup serangkaian upaya dan perubahan multilevel pada individu, kelompok, organisasi, dan sistem, dengan tujuan memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi agar mampu merespons perubahan lingkungan yang terjadi Yuswijaya(2008) dalam Fajar et al., (2023). mepertegas bahwa *capacity building* merupakan kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus.

Dalam perspektif administrasi publik, *capacity building* dipahami sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu, organisasi, dan sistem kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi tata kelola publik secara efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat(Damayanti et al., 2014). UNDP(1999) dalam Nugraha et al., (2004) mengembangkan strategi pengembangan kapasitas, yang terdiri dari 9 (sembilan) dimensi, yang meliputi: (1) misi dan strategi birokrasi; (2) kultur organisasi; (3) struktur organisasi; (4) kompetensi organisasi; (5) proses-proses organisasi; (6) sumber daya manusia; (7) sumber daya keuangan; (8) sumber daya informasi; (9) infrastruktur.

Karakteristik utama dari pengembangan kapasitas adalah sifatnya yang merupakan proses peningkatan secara terus-menerus (*continuous improvement*), dan bukan sekadar kegiatan yang bersifat satu kali atau temporer, sehingga membutuhkan pembelajaran dan penyesuaian yang berkelanjutan dalam organisasi(Dwi Ratnasari et al., 2013). Tujuan akhir dari *capacity building* adalah mengharapkan organisasi tumbuh menjadi lebih kuat dalam mencapai tujuan dan

misinya. Secara lebih spesifik, tujuan pengembangan kapasitas untuk pembagian kerja lebih tertata dan terpantau, serta sumber daya keuangan dapat digunakan secara lebih maksimal dan efisien(Bikorin et al., 2025). Selain itu, pengembangan kapasitas bertujuan menciptakan kondisi organisasi yang proaktif dan tanggap sehingga mampu menghasilkan inovasi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing daerah dalam jangka panjang(Dwi Ratnasari et al., 2013).

Arthur L. Stinchcombe(1965) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dipengaruhi oleh variabel internal dan lingkungan sosial yang menentukan kemampuan organisasi mencapai tujuannya. Pandangan ini sejalan dengan Douglas(2003) dalam Nugraha et al., (2004) menyatakan bahwa kapasitas organisasi sebagai potensi organisasi dalam menerapkan keterampilan dan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan serta memenuhi harapan pemangku kepentingan, di mana pengembangan kapasitas bertujuan meningkatkan potensi kinerja organisasi yang tercermin dalam sumber daya dan manajemennya, yang selanjutnya digambarkan Douglas dalam sebuah skema keterkaitan pengembangan kapasitas organisasi sebagai berikut.

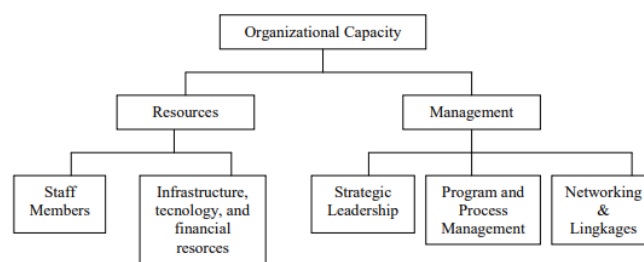


Sumber : (Nugraha et al., 2004)

Gambar 1.3
Kerangka Kerja untuk Penilaian Organisasi oleh Douglas(2003)

Dari gambar tersebut Douglas(2003) menyimpulkan bahwa kinerja organisasi dalam prosesnya di pengaruhi oleh kapasitas organisasi, lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Konsep pengembangan kapasitas organisasi sejalan dengan konsep pengembangan kelembagaan (*organizational development*), karena keduanya sama-sama menekankan pada upaya meningkatkan kemampuan organisasi. Narayanan(1993) menjelaskan bahwa pengembangan kelembagaan merupakan usaha jangka panjang untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah dan melakukan pembaruan, terutama melalui pengelolaan budaya organisasi yang lebih efektif dan kerja sama yang baik, dengan dukungan agen perubahan serta pemanfaatan teori dan teknologi. Salah satu model yang dikemukakan Narayanan(1993), yaitu *Nadler dan Tushman's Contingency Model*, mencakup empat komponen utama, yaitu tugas, individu, pengaturan organisasi, dan organisasi informal. Meskipun tidak sepenuhnya sama, komponen-komponen tersebut memiliki kesamaan dengan unsur-unsur pengembangan kapasitas organisasi menurut Douglas(2003), yang selanjutnya menjelaskan keterkaitan seluruh unsur pengembangan kapasitas tersebut dalam sebuah kerangka atau model konseptual sebagai berikut.



Sumber : (Nugraha et al., 2004)

Gambar 1.4
Jenis-jenis Kapasitas Organisasi

Dengan demikian, kerangka pengembangan kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Douglas(2003) merupakan hasil elaborasi dan pengembangan dari berbagai teori organisasi dan pengembangan kelembagaan sebelumnya, yang kemudian disusun dalam sebuah model konseptual untuk menilai keterkaitan antara lingkungan internal, lingkungan eksternal, kapasitas organisasi, dan kinerja organisasi.

Acosta dalam Nugraha et al., (2004) menyatakan bahwa strategi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah perlu difokuskan pada empat aspek utama, yang meliputi :

1. Peningkatan sistem manajemen : merupakan upaya membangun struktur organisasi yang lebih adaptif, fleksibel terhadap perubahan, serta didukung oleh prosedur kerja yang efektif dan efisien.
2. Pengembangan kompetensi aparatur : merupakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kemampuan individu maupun kerja sama dalam kelompok.
3. Penetapan tujuan yang lebih efektif : sebuah proses pencapaian tujuan organisasi melalui penguatan budaya organisasi, termasuk sistem nilai, komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan.
4. Internalisasi akuntabilitas publik : merupakan penanaman nilai-nilai akuntabilitas sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik oleh organisasi.

Konsep pengembangan kapasitas menurut Grindle(1997) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang tepat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Grindle menegaskan bahwa pengembangan kapasitas mengacu pada peningkatan kemampuan organisasi sektor publik(Nugraha et al., 2004).

Grindle(1997) mengemukakan bahwa *capacity building* merupakan serangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya fisik(Fajar et al., 2023). Teori *Capacity building* oleh konsep Grindle(1997) pada buku "*Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*" memberikan pandangan yang jelas tentang upaya membangun kapasitas sektor publik di negara-negara berkembang(Margaretha, 2024). Teori yang dikembangkan oleh Grindle(1997) terkait *capacity building* difokuskan pada tiga dimensi utama yang saling berkaitan dan menentukan optimalisasi organisasi dalam menjalankan fungsi publik yaitu sebagai berikut (Damayanti et al., 2014; Margaretha, 2024) :

1. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) : Berfokus pada ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja yang kompeten dan profesional.
2. Penguatan organisasi : Pelaksanaan sistem manajemen internal sebagai upaya peningkatan kinerja, tugas dan fungsi tertentu : mikrostruktur.
3. Reformasi kelembagaan : Merupakan pengaturan pada tingkat makro yang meliputi kebijakan yang berlaku yaitu peraturan ekonomi dan politik,

perubahan kebijakan, dan hukum konstitusi yang mampu berdampak pada pengembangan kapasitas.

Untuk memperjelas dimensi pengembangan kapasitas menurut Grindle(1997), berikut skema pemetaan dimensi, fokus, dan jenis aktivitas pengembangan kapasitas organisasi sektor publik.

Tabel 1.3 Dimensi Pengembangan Kapasitas

Dimensi	Fokus	Jenis Aktivitas
Pengembangan SDM	Ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja yang kompeten dan profesional.	1. Rekrutmen 2. Pelatihan dan Pendidikan 3. Praktik Pengalaman Kerja
Penguatan Organisasi	Pelaksanaan sistem manajemen internal sebagai upaya peningkatan kinerja, tugas dan fungsi tertentu : mikrostruktur.	1. Sistem insentif. 2. Kepemimpinan. 3. Budaya Organisasi. 4. Komunikasi. 5. Sistem SDM
Reformasi Kelembagaan	Pengaturan kelembagaan secara makro.	1. Kebijakan yang berlaku yaitu peraturan ekonomi dan politik, perubahan kebijakan, dan hukum konstitusi yang mampu berdampak pada pengembangan kapasitas.

Sumber : Grindle, (1997)

Dalam membangun kapasitas yang kokoh, terdapat tiga komponen utama yang harus terintegrasi, yaitu komponen fondasi, kompetensi, dan kapabilitas(Bikorin et al., 2025) :

1. Komponen fondasi, yaitu mencakup aspek informasi, budaya, dan nilai-nilai organisasi yang menjadi dasar perilaku kolektif.

2. Komponen kompetensi, yaitu mencakup pada perilaku, keterampilan, serta motivasi individu
3. Kapabilitas, yaitu penggabungan antara keterampilan dan kompetensi yang dimiliki secara kolektif oleh organisasi, yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan serta mempertahankan daya saingnya secara berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi pengembangan kapasitas dipengaruhi oleh faktor pengungkit utama (*key leverage*), salah satunya adalah komitmen bersama (*collective commitment*) dari seluruh komponen organisasi dalam menjalankan perubahan (Dwi Ratnasari et al., 2013). Selain itu, kepemimpinan yang kondusif, dinamis, serta mampu memberikan dukungan dan pengakuan terhadap kinerja anggota tim, bersama dengan partisipasi pemangku kepentingan dan kemitraan strategis, berperan penting dalam mempercepat proses internal organisasi melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

Berdasarkan beberapa uraian terkait *capacity building*, *capacity building* adalah proses pengembangan kapasitas yang bersifat sistematis dan multidimensional untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi maupun sistem kelembagaan agar mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. Penelitian ini menggunakan teori *capacity building* oleh Grindle (1997) karena memberikan kerangka yang menyeluruh untuk menganalisis pengembangan kapasitas melalui tiga aspek utama, tidak hanya pada aspek individu, tetapi juga organisasi lokal dan kelembagaan. Permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan ekowisata di Kota Semarang tidak hanya berkaitan dengan

kemampuan masyarakat lokal sebagai pengelola wisata, tetapi juga menyangkut sistem organisasi Pokdarwis serta dukungan kebijakan dan lingkungan kelembagaan yang memengaruhi pengelolaan ekowisata. Oleh karena itu, teori Grindle dipilih karena dapat memberikan kerangka analisis yang lebih menyeluruh dalam melihat keberhasilan maupun hambatan *capacity building* Pokdarwis dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat lokal.

1.6.6 Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik(*good governance*) menurut Nadeak(2024) merupakan bentuk pemerintahan yang mampu menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. World Bank (1992) menegaskan bahwa *good governance* menempatkan transparansi dan partisipasi publik sebagai fondasi utama bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan publik(Rahmawati & Tjenreng, 2025).

Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memepengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai *good* dalam kehidupan sehari-hari. Istilah *good* dalam konsep *good governance* memiliki makna yang luas. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Nurhidayat (2023) kata *good* mengandung dua pengertian utama, yaitu:

1. *Good* berkaitan dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak dan kepentingan rakyat, serta mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan tersebut meliputi terwujudnya kemandirian, pembangunan yang berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2. *Good* merujuk pada aspek fungsional pemerintahan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dalam konteks administrasi negara di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi perhatian utama dalam berbagai kebijakan dan regulasi, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Prinsip-prinsip seperti legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik merupakan landasan utama yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengatasi permasalahan birokrasi (Hani-fah et al., 2024).

Konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan secara baik, adil dan bertanggungjawab menurut World Bank (1992) didasarkan pada beberapa prinsip utama :

1. Partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara sah. Partisipasi ini didukung oleh kebebasan menyampaikan pendapat dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif secara positif dalam pemerintahan.

2. Supremasi hukum, yaitu berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan berlaku sama bagi semua pihak. Setiap warga negara dilindungi oleh hukum, termasuk dalam hal pemenuhan hak asasi manusia.
3. Transparansi, yaitu menunjukkan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi mengenai kebijakan dan proses pemerintahan harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
4. Kepedulian terhadap pemangku kepentingan, yaitu menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga terkait harus memperhatikan serta melayani kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses pemerintahan.
5. Orientasi pada konsensus, yaitu berarti pemerintah berupaya menyatukan berbagai perbedaan kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama demi kepentingan masyarakat luas.
6. Kesetaraan, yaitu menekankan bahwa setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menghasilkan pelayanan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan penggunaan sumber daya secara tepat.
8. Akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah dan pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat.

9. Visi Strategis, yaitu berarti bahwa para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan jangka panjang dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan, serta memahami kondisi sosial, budaya, dan sejarah yang ada.

Kinerja pemerintah merupakan indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan. Verboncu(2005) mendefinisikan kinerja sebagai pencapaian hasil terbaik dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu entitas. Secara operasional, Messer (2017) menyatakan bahwa pengendalian manajemen dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik sebagai keluaran dari tata kelola yang baik dapat diukur melalui lima dimensi yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry(1988), yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Kelima dimensi tersebut saling berkaitan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap profesionalisme dan kinerja pemerintah(Rahmawati & Tjenreng, 2025).

Partisipasi publik merupakan unsur penting dalam penerapan *good governance*, yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Prinsip ini mencakup keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Melalui partisipasi publik, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih terbuka, merespons kebutuhan masyarakat, dan bersifat inklusif. Di Indonesia, partisipasi publik telah diatur secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, yang mengatur pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Hanifah et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, tata kelola pemerintahan (*good governance*) merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, berlandaskan supremasi hukum, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat.

1.6.7 Ekowisata Berkelanjutan

Ekowisata atau *ecotourism* merupakan bagian dalam pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada tanggung jawab terhadap pelestarian wilayah alami serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. (Wiyono et al., 2023) *The International Ecotourism Society* (TIES) menjelaskan ekowisata sebagai bentuk pariwisata yang berorientasi pada tanggung jawab terhadap lingkungan alam, pelestarian ekosistem, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dengan memasukkan unsur edukasi dan interpretasi lingkungan. Konsep ekowisata berkembang sebagai reaksi terhadap pertumbuhan pariwisata massal yang menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan alam. Selain itu, Oktami et al. (2018) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat lokal melalui sistem pengelolaan yang terdesentralisasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan ekowisata (Wiyono et al., 2023).

Sejak 1970an, organisasi konservasi mulai melihat ekowisata sebagai alternatif ekonomi yang berbasis konservasi karena tidak merusak alam ataupun tidak “ekstraktif” dengan berdampak negatif terhadap lingkungan seperti penebangan dan pertambangan. Ekowisata juga dianggap sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Namun agar ekowisata tetap berkelanjutan, perlu tercipta kondisi yang memungkinkan di mana masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha ekowisata, mengatur arus dan jumlah wisatawan, dan mengembangkan ekowisata sesuai visi dan harapan masyarakat untuk masa depan. Ekowisata dihargai dan dikembangkan sebagai salah satu program usaha yang sekaligus bisa menjadi strategi konservasi dan dapat membuka alternatif ekonomi bagi masyarakat. Dengan pola ekowisata, masyarakat dapat memanfaatkan keindahan alam yang masih utuh, budaya, dan sejarah setempat tanpa merusak atau menjual isinya (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata & Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia, 2009).

Ekowisata didasarkan pada sejumlah prinsip utama, antara lain kegiatan wisata yang berbasis alam, upaya konservasi, keberlanjutan, pengelolaan yang beretika, serta penekanan pada peran dan manfaat lokal, termasuk pengendalian skala kegiatan dan pendidikan lingkungan (Wiyono et al., 2023). Keberhasilan pengembangan ekowisata sangat dipengaruhi oleh penerapannya di tingkat lokal atau pemerintahan daerah, di mana kepentingan berbagai pelaku ekowisata harus diselaraskan dengan kebutuhan dan harapan wisatawan.

Hector Ceballos-Lascurain memaparkan konsep ekowisata yang mendefinisikannya sebagai perjalanan ke kawasan alami yang relatif belum terganggu atau tercemar, dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati keindahan alam, flora, fauna, serta manifestasi budaya masyarakat setempat (Herman & Supriadi, 2017). Karakteristik utama yang membedakan ekowisata dari pariwisata konvensional menurut Budiasih et al., (2024) meliputi: (1) penghormatan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya, (2) pemberian manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, (3) pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, (4) upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, (5) penyediaan pengalaman edukatif dan interpretatif, serta (6) kepatuhan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan landasan tersebut, ekowisata berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif sekaligus pelestarian identitas nasional (Priono, 2012).

Keberhasilan ekowisata sangat bergantung pada tingkat kontrol masyarakat lokal serta keadilan dalam pembagian manfaat. Pemberdayaan masyarakat dalam ekowisata mencakup enam dimensi utama, yaitu pemberdayaan ekonomi yang ditandai oleh tersedianya peluang kerja, distribusi manfaat yang adil, dan peningkatan infrastruktur; pemberdayaan psikologis berupa peningkatan rasa percaya diri dan martabat masyarakat; pemberdayaan sosial melalui penguatan kohesi dan integritas komunitas; pemberdayaan politik yang ditunjukkan oleh keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; pemberdayaan lingkungan melalui pengetahuan dan komitmen terhadap pelestarian biodiversitas; serta

pemberdayaan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai moral, spiritual, dan gaya hidup berkelanjutan(Wiyono et al., 2023).

Pola ekowisata berbasis masyarakat adalah pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola.

Ekowisata berbasis masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa wisata untuk turis: fee pemandu; ongkos transportasi; homestay; menjual kerajinan, dan sebagainya. Ekowisata membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata.

Dengan adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti bahwa masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri. Tataran implementasi ekowisata perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan terpadu

yang dilakukan di suatu daerah. Untuk itu, pelibatan para pihak terkait mulai dari level komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan organisasi non pemerintah diharapkan membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai peran dan keahlian masing-masing. Beberapa aspek kunci dalam ekowisata berbasis masyarakat adalah:

1. Masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan ekowisata di daerahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat (nilai partisipasi masyarakat dan edukasi).
2. Prinsip *local ownership* (pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat) diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana dan pra-sarana ekowisata, kawasan ekowisata, dll (nilai partisipasi masyarakat).
3. *Homestay* menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata (nilai ekonomi dan edukasi).
4. *Homestay* menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata (nilai ekonomi dan edukasi).
5. Perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata menjadi tanggung-jawab masyarakat setempat, termasuk penentuan biaya (fee) untuk wisatawan (nilai ekonomi dan wisata).

Ekowisata memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kawasan konservasi. Agar ekowisata dapat berjalan optimal dan menguntungkan, diperlukan beberapa upaya, seperti Pengembangan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan akses transportasi tanpa merusak

lingkungan alami. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata dapat menjadi sumber ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam.

Selain sarana prasarana, perlunya memahami pemasaran produk ekowisata. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat harus memperhatikan dua hal utama, yaitu:

1. Layak secara ekonomi, memberikan pendapatan yang nyata dan dikelola secara profesional
2. Adil dan berkelanjutan, memberi manfaat bagi masyarakat lokal serta mendukung konservasi

Terdapat pula strategi pemasaran menjadi kunci keberhasilan, antara lain melalui:

1. Promosi di tingkat nasional dan internasional
2. Survei pasar untuk memahami kebutuhan wisatawan
3. Penentuan target pasar yang tepat
4. Kegiatan promosi khusus seperti *fam trip* dan *media trip*
5. Kerja sama dengan pihak swasta dan *tour operator*

Pemasaran yang baik akan meningkatkan daya saing ekowisata sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat & Konservasi yaitu:

1. Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Ekowisata harus bersifat ramah lingkungan (*green*) dan adil (*fair*), yaitu mampu menjaga kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kegiatan wisata tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan agar tidak merusak ekosistem maupun budaya setempat. Selain itu, penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan juga dianjurkan.

Artinya, ekowisata harus bisa berjalan dalam jangka panjang tanpa merusak alam dan tetap menguntungkan masyarakat.

2. Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan

Pengelolaan ekowisata memerlukan organisasi masyarakat yang kuat serta kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan LSM. Kemitraan ini penting untuk mendukung pemasaran, pengelolaan, dan pengembangan wisata. Selain itu, pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil dan transparan. Dengan adanya kelembagaan yang baik, masyarakat dapat menjadi pelaku utama tanpa bergantung penuh pada pihak luar.

3. Ekonomi Berbasis Masyarakat

Ekowisata bertujuan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat, misalnya melalui homestay, pemandu wisata lokal, dan usaha kecil seperti kerajinan. Sistem homestay menjadi penting karena memungkinkan wisatawan berinteraksi langsung dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan warga. Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan wisata tidak keluar dari daerah, tetapi dinikmati oleh masyarakat setempat.

4. Prinsip Edukasi

Ekowisata tidak hanya untuk rekreasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan. Wisatawan diberikan pemahaman tentang pentingnya konservasi lingkungan dan penghargaan terhadap budaya lokal. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga alam. Bahkan, wisatawan dapat dilibatkan langsung dalam kegiatan konservasi. Dengan edukasi, ekowisata dapat meningkatkan kepedulian semua pihak terhadap lingkungan.

5. Perencanaan Kawasan dan Pengelolaan Wisata

Pengembangan ekowisata harus direncanakan dengan baik melalui pengaturan jumlah wisatawan, sistem zonasi, dan pembangunan fasilitas yang tidak merusak lingkungan. Fasilitas wisata sebaiknya menyesuaikan dengan budaya lokal dan dilengkapi dengan sistem pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, kegiatan wisata dapat dikombinasikan dengan aktivitas budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Perencanaan yang baik akan menjaga keseimbangan antara kegiatan wisata dan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan ekowisata berkelanjutan menuntut pergeseran dari pendekatan *top-down* menuju model integratif berbasis kolaborasi antar aktor. Sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam promosi, sistem reservasi, serta pemantauan lingkungan berbasis komunitas menjadi inovasi penting dalam mendukung keberlanjutan ekowisata. Selain itu, integrasi kearifan

lokal ke dalam kebijakan pemerintah daerah menjadi faktor kunci agar pengembangan pariwisata tetap selaras dengan nilai-nilai masyarakat setempat(Alfiandri & Mayarni, 2023)

Berdasarkan berbagai kajian teoritis di atas, ekowisata adalah bentuk pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada kegiatan wisata berbasis alam dengan menekankan pelestarian lingkungan, pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat lokal, serta penyediaan pengalaman edukatif bagi wisatawan melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

1.6.8 Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal adalah suatu proses pengembangan kegiatan wisata pada pemanfaatan potensi sumber daya lokal dan dikelola oleh masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konsep ini, masyarakat setempat sebagai aktor utama dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sementara itu, pihak eksternal seperti pemerintah, akademisi dan swasta berperan sebagai mitra pendukung yang membantu memfasilitasi kebutuhan mereka(Kamaluddin & Tamrin, 2019).

Menurut Kamaluddin & Tamrin(2019) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal memiliki keterkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat, karena pariwisata, khususnya ekowisata diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan menempatkan masyarakat lokal

sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan wisata melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, sementara peran pihak eksternal bersifat sebagai pendamping dan fasilitator. Pendekatan ini memberikan akses, kontrol, dan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan lokal, sehingga pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial, partisipasi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak, yang kemudian berkembang menjadi konsep pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk menjadikan masyarakat mampu serta memiliki kecakapan dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi (Mursalim & Ramdani, 2016). Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki otoritas dalam menentukan arah pembangunan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup sosial-ekonomi masyarakat, termasuk kemampuan mereka dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Dengan membangun kapasitas kolektif serta memperkuat solidaritas sosial, pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal (Ansar Firman, 2021).

Teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Robert Chambers (1995) dalam Qur'ainny et al., (2025) memberikan landasan konseptual bahwa pembangunan

yang ideal harus berpusat pada masyarakat (*people-centered*) dan bersifat *bottom-up*. Chambers merumuskan empat prinsip utama pemberdayaan, yaitu *people-centered*, *participatory*, *empowerment*, dan *sustainability*. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dari intervensi eksternal yang bersifat memaksakan menjadi proses pendampingan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kapasitas masyarakat dari dalam. Selain itu, Chambers menekankan pentingnya metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai sarana bagi masyarakat marginal untuk mengidentifikasi masalah, memetakan potensi, serta merumuskan solusi secara mandiri.

Jim Ife(2006) dalam (Hidayat et al., 2025) menjelaskan bahwa penguatan kelompok masyarakat dapat dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu penguatan pelayanan melalui perencanaan kebijakan yang menjamin akses terhadap sumber daya, aksi sosial dan politik untuk membangun kekuasaan yang efektif, serta proses pendidikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif ini, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Melalui pemberdayaan yang terarah, masyarakat dibekali kemampuan untuk mengenali potensi lokal, mengambil keputusan secara kolektif, serta memiliki keberanian bertindak dalam memperbaiki kualitas hidupnya.

Selain itu, Widjajanti, (2011) merumuskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat, perencanaan program, pelaksanaan program, serta keterlibatan dalam evaluasi. Kuantitas partisipasi mencerminkan luasnya keterli-

batan masyarakat, sedangkan kualitas partisipasi menunjukkan kedalaman peran aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan keberlanjutan program. Perencanaan program harus dilakukan secara sistematis melalui identifikasi kebutuhan riil masyarakat, sementara pelaksanaan program diarahkan untuk memberikan ruang belajar dan peningkatan keterampilan teknis maupun manajerial bagi masyarakat.

Secara konseptual, Sumodiningrat(2009) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki(Habib, 2021). Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana, serta dukungan pendanaan berdasarkan skala prioritas kebutuhan warga(Prasasti & Ma'ruf, 2025). Selaras dengan pendapat tersebut, Rasysid (2003) mengemukakan bahwa peran pemerintah mencakup fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*) (Qur'ainny et al., 2025).

Strategi pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan teknis, pendidikan kewirausahaan, serta penguatan literasi keuangan. Dengan mengembangkan potensi lokal, masyarakat didorong untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam dan budaya secara mandiri, sehingga tercipta kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan tidak bergantung secara berlebihan pada bantuan eksternal(Habeahan et al., 2025).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan penting dalam pembangunan, khususnya di negara berkembang yang dihadapkan pada permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Pendekatan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Model pemberdayaan masyarakat tidak bersifat universal, sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi spesifik setiap wilayah. Terdapat tujuh model pemberdayaan yang dapat diterapkan sesuai konteks dan kebutuhan menurut (Habeahan et al., 2025):

1. Model Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Development*)

Model ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Prinsip utama model ini meliputi partisipasi aktif, transparansi, keadilan sosial, dan kepemilikan lokal terhadap program. Melalui keterlibatan langsung, masyarakat didorong untuk mampu mengelola sumber daya dan menyelesaikan permasalahan lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Model Pendidikan Partisipatif (*Participatory Education*)

Model pendidikan partisipatif menekankan proses pembelajaran yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pengetahuan tidak hanya bersumber dari fasilitator, tetapi juga dari pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Model ini bertujuan meningkatkan kapasitas, kesadaran kritis,

serta kemampuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

3. Model Pemberdayaan Ekonomi (*Economic Empowerment*)

Model ini berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan keterampilan, akses permodalan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kerja sama lintas sektor. Pemberdayaan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

4. Model Pemberdayaan Politik (*Political Empowerment*)

Pemberdayaan politik diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Melalui pendidikan politik dan penguatan kapasitas advokasi, masyarakat didorong untuk memahami hak dan kewajibannya serta mampu memperjuangkan kepentingan bersama, khususnya bagi kelompok marginal.

5. Model Pemberdayaan Sosial (*Social Empowerment*)

Model pemberdayaan sosial berorientasi pada penguatan jaringan, solidaritas, dan hubungan sosial antaranggota masyarakat. Tujuan utama model ini adalah menciptakan kerja sama, kepedulian kolektif, dan dukungan

sosial yang mampu mendorong perubahan sosial secara inklusif dan berkelanjutan.

6. Model Pemberdayaan Teknologi (*Technological Empowerment*)

Model ini menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan teknologi dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan perluasan akses teknologi agar masyarakat dapat memperoleh informasi, layanan, serta peluang ekonomi dan pendidikan secara lebih luas.

7. Model Pemberdayaan Lingkungan (*Environmental Empowerment*)

Pemberdayaan lingkungan bertujuan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam. Model ini mengintegrasikan kegiatan konservasi dengan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, seperti ekowisata dan usaha ramah lingkungan, sehingga masyarakat memperoleh manfaat langsung dari keberlanjutan lingkungan.

Pada era *Society 5.0*, pemberdayaan masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan transformasi digital yang mengintegrasikan teknologi maju dengan nilai-nilai kemanusiaan (Habeban et al., 2025). Strategi pemberdayaan di era ini mencakup peningkatan literasi digital agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen teknologi, tetapi juga sebagai produsen nilai kreatif yang kompetitif. Penguatan komunitas kreatif lokal serta kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan digital. Program inkubasi bisnis kreatif juga diperlukan sebagai bentuk pendampingan jangka panjang bagi pelaku usaha lokal dalam menghadapi dinamika pasar global.

Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, melalui kajian Putra Nugraha et al., (2024) terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Dukungan Pemerintah : Dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui penyusunan kebijakan, regulasi, dan program yang mendukung perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peran tersebut membantu menciptakan pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat : Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan karena masyarakat berperan dalam menjaga warisan budaya, melestarikan lingkungan, dan mempertahankan keaslian destinasi wisata. Keterlibatan aktif masyarakat juga membantu meminimalkan dampak negatif pariwisata serta mendukung keberlanjutan destinasi wisata dalam jangka panjang.

Kajian oleh Nadhifatur Rifdah et al., (2024) menyatakan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi sosial dalam pengembangan kawasan pariwisata sebagai berikut :

1. Dukungan Pemerintah : Berfungsi sebagai katalisator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan pariwisata melalui berbagai bentuk inisiatif dan bantuan, yang perlu

diimbangi dengan koordinasi yang baik dan upaya berkelanjutan dari kedua belah pihak.

2. Keunggulan Objek Wisata : Keunikan dan potensi alam, budaya, serta unsur lokal dari setiap destinasi wisata memainkan peran kunci dalam mendorong keterlibatan masyarakat lokal.
3. Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur : Peningkatan fasilitas dan infrastruktur di kawasan wisata mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan rasa bangga dan kepemilikan terhadap destinasi wisata lokal.
4. Keterlibatan komunitas : Keberadaan dan peran aktif komunitas dalam berbagai bentuk, baik melalui kelompok sadar wisata, organisasi pemuda, maupun kelompok pengrajin, kelompok mahasiswa dan komunitas yang lain menunjukkan bahwa komunitas dapat menjadi pendorong utama dalam mengembangkan kawasan pariwisata.
5. Pemantauan program pemberdayaan : Pemantauan program terkait pendampingan pelatihan merupakan faktor penting yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan pariwisata. Pemantauan pelatihan yang efektif mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan motivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pariwisata, sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Proses pemberdayaan masyarakat sering menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya kesadaran politik lokal, serta keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia. Budaya ketergantungan

terhadap bantuan pemerintah dan regulasi yang birokratis juga dapat menghambat inisiatif dan inovasi masyarakat. Prinsip keberlanjutan menekankan bahwa hasil pemberdayaan harus mampu memberikan dampak jangka panjang dan dapat dipelihara secara mandiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi pendampingan dan transparansi dalam tata kelola menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya masyarakat yang benar-benar berdaya dan mandiri(Kasmawanto, 2025).

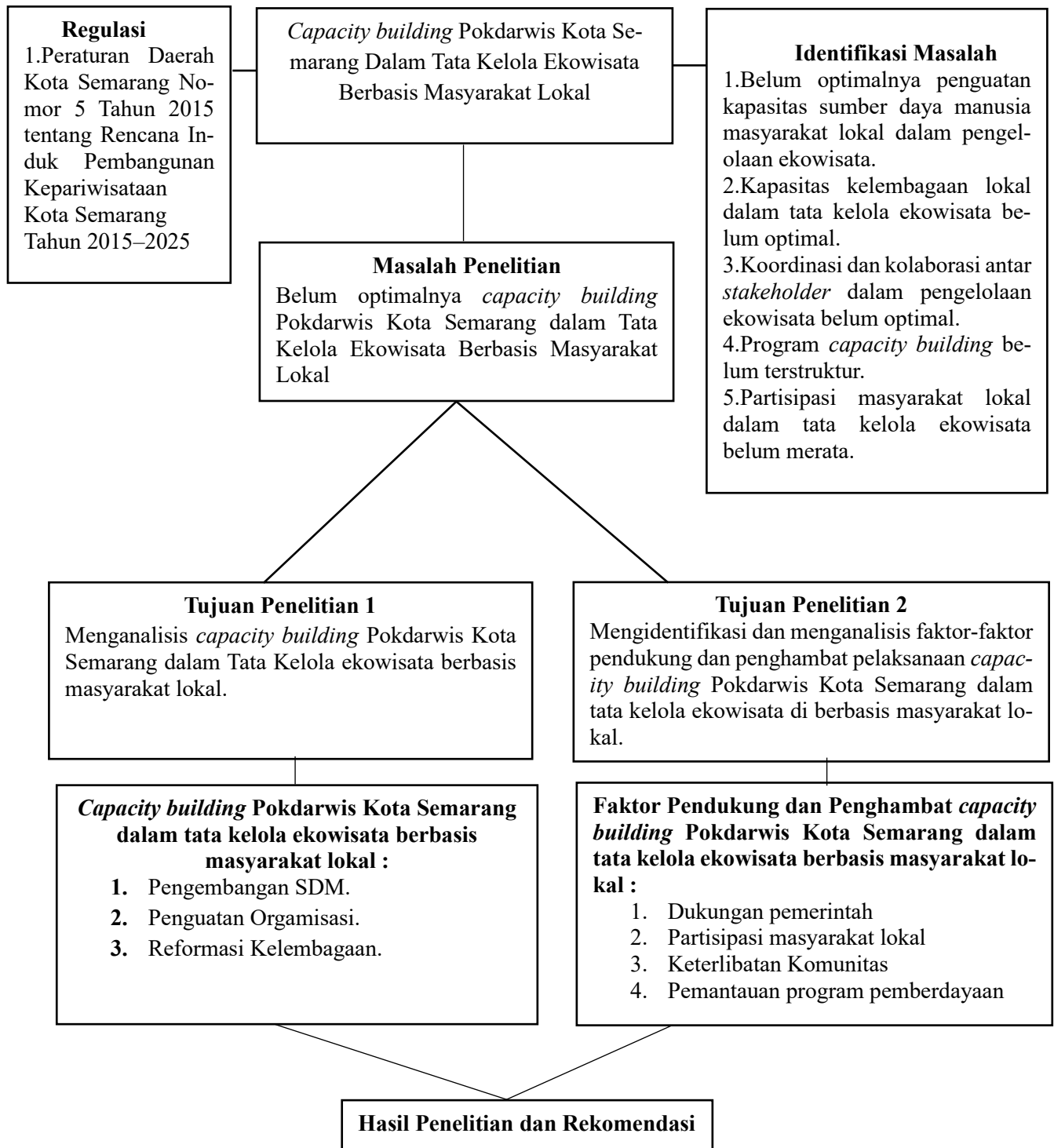
Berdasarkan berbagai kajian teoritis, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal adalah proses pengelolaan kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Pemerintah dan pihak eksternal berperan sebagai fasilitator, sementara pariwisata menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat individu, kelembagaan dan kemandirian masyarakat lokal.

Dalam penelitian ini, faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi peningkatan kapasitas menggunakan kajian Nadhifatur Rifdah et al., (2024) dan Putra Nugraha et al., (2024) meliputi :

1. Dukungan Pemerintah: Dukungan pemerintah melalui kebijakan, koordinasi dalam bentuk regulasi, pelatihan, pendampingan, dan pengawasan memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan kapasitas komunitas.

2. Partisipasi Masyarakat : Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, evaluasi, dan pelaksanaan program maupun kegiatan sangat penting untuk keberhasilan pembangunan kapasitas. Partisipasi ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan menginginkan program.
3. Keterlibatan komunitas : Kolaborasi dengan berbagai pihak komunitas, seperti organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan akademisi, dapat memperluas peluang pelatihan, pendanaan, dan inovasi dalam pengelolaan pariwisata.
4. Pemantauan program pemberdayaan : Pemantauan pemberdayaan program diperlukan untuk keberlanjutan dan efektivitasnya. Hal ini mencakup evaluasi dampak program terhadap masyarakat dan lingkungan . Pemantauan yang baik memungkinkan penyesuaian strategi berdasarkan kebutuhan lokal dan hasil yang diinginkan.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Diolah oleh Penulis(2026)

Gambar 1.5
Gambar Kerangka Pikir Penelitian

1.8 Operasionalisasi Konsep

Konsep menurut Soedjadi(2000) merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah.

Sedangkan operasionalisasi konsep adalah proses mengubah konsep yang masih bersifat abstrak menjadi hal-hal yang dapat diukur secara nyata melalui indikator tertentu, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data secara sistematis(Muspawati, 2024).

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan konsep :

- a. *Capacity building* adalah proses pengembangan yang bersifat sistematis dan multidimensional untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi maupun sistem kelembagaan agar mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal dan berkelanjutan.
- b. Tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal merupakan pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama melalui partisipasi aktif dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Penelitian dengan judul “*Capacity building* Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis) Kota Semarang Dalam Tata Kelola Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal” ditata lebih operasional akan dilihat dari fenomena dan gejala sebagai berikut :

- a. *Capacity building* akan dilihat dari Sub-Fenomena dan gejala sebagai berikut:

Capacity building melalui sub-fenomena pertama yaitu dimensi pengembangan sumber daya manusia menekankan peningkatan kualitas individu atau organisasi sebagai aktor utama pembangunan. Dimensi ini berfokus pada ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Pada penelitian ini, gejala yang akan dianalisis melalui Pokdarwis Kota Semarang dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata perkotaan. Fokus analisis meliputi aktivitas rekrutmen aktor pengelola ekowisata, pelaksanaan pelatihan dan pendidikan, serta kesempatan praktik dan pengalaman kerja langsung di lapangan. Optimalisasi pengembangan sumber daya manusia dilihat dari upaya kesiapan, kompetensi, dan peran aktif masyarakat lokal dalam mendukung pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

Sub-fenomena kedua, yaitu penguatan organisasi, berfokus pada peningkatan kapasitas organisasi agar mampu menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam mendukung fungsi, tugas maupun peran dalam internal organisasi. Dalam penelitian ini, penguatan organisasi berkaitan dengan kemampuan organisasi atau komunitas pengelola ekowisata di Kota Semarang yaitu Pokdarwis dalam mengelola sumber daya, membangun kinerja organisasi, serta menjaga keberlangsungan pengelolaan ekowisata. Analisis penguatan organisasi melalui gejala sistem insentif, peran kepemimpinan, budaya organisasi, efektivitas komunikasi, serta sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi

pengelola ekowisata. Sub-fenomena ini digunakan untuk menganalisis kapasitas internal organisasi dalam melaksanakan sistem manajemen internal melalui peningkatan kinerja, tugas dan fungsi yang ada.

Sub-fenomena ketiga, yaitu reformasi kelembagaan yang kebijakan yang berlaku meliputi peraturan ekonomi dan politik, perubahan kebijakan, dan hukum konstitusi yang mampu berdampak pada pengembangan kapasitas. Dalam penelitian ini, reformasi kelembagaan dianalisis melalui gejala kebijakan dan regulasi yang berlaku, pola koordinasi antar perangkat daerah, dan kelembagaan baik secara internal maupun diluar kelembagaan lokal. Sub-fenomena ini digunakan untuk menganalisis dukungan kebijakan daerah maupun regulasi internal dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat.

- b. Faktor Pendukung dan Penghambat *Capacity building* Pokdarwis Kota Semarang Dalam Tata Kelola Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal akan dilihat dari Sub-Fenomena dan gejala sebagai berikut :

Dalam pengembangan sektor pariwisata khususnya pada ekowisata, keberhasilan suatu destinasi sangat dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung merupakan kondisi atau unsur yang memperkuat proses pengembangan pariwisata, sedangkan faktor penghambat adalah kondisi yang menghambat atau memperlambat pencapaian tujuan pengembangan pariwisata. Faktor pendukung dan penghambat dari penelitian ini akan dilihat dari sub-fenomena dan gejala sebagai berikut :

Sub fenomena pertama yaitu dukungan pemerintah, yaitu peran dan keterlibatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menyediakan program, serta memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan kapasitas Pokdarwis sebagai pengelola ekowisata berbasis masyarakat lokal. Dukungan ini menjadi faktor pendukung apabila terdapat program pelatihan, pendampingan rutin, monitoring kelembagaan Pokdarwis, kejelasan peran OPD serta dukungan anggaran pembinaan yang berkelanjutan. Sebaliknya, dukungan pemerintah menjadi faktor penghambat apabila program *capacity building* tidak berfokus pada ekowisata, tidak berkelanjutan, serta koordinasi antar perangkat daerah masih lemah.

Sub-fenomena kedua yaitu partisipasi masyarakat lokal, yaitu merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembagian tugas, serta penguatan organisasi pengelolaan kegiatan pariwisata. Partisipasi menjadi faktor pendukung apabila masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan, memiliki rasa kepemilikan terhadap destinasi serta mampu bekerjasama dalam organisasi. Sebaliknya, partisipasi menjadi faktor penghambat apabila masyarakat bersifat pasif, kurang terlibat dalam kegiatan pengembangan kapasitas sebagai pengelola ekowisata.

Sub-fenomena ketiga yaitu keterlibatan komunitas, yaitu merujuk pada adanya kerja sama antara pengelola ekowisata dengan pihak lain seperti perguruan tinggi, swasta, komunitas, maupun lembaga pendamping yang turut berperan dalam kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola. Kolaborasi ini akan menjadi faktor pendukung apabila terdapat pendampingan, pelatihan atau kerja

sama yang meningkatkan kemampuan pengelola. Sebaliknya, kolaborasi menjadi faktor penghambat apabila pengelola berjalan sendiri tanpa adanya dukungan, pembinaan atau keterlibatan pihak lain dalam proses pengelolaan ekowisata.

Sub-fenomena keempat yaitu pemantauan program pemberdayaan, yaitu merujuk pada adanya upaya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan pengelola serta keberadaan program pemberdayaan masyarakat yang mendukung peningkatan *capacity building* ekowisata. Pemantauan ini penting untuk melihat sejauh mana program *capacity building* memberikan dampak terhadap kemampuan pengelola dalam mengelola destinasi.

Hal ini menjadi faktor pendukung apabila terdapat dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi, serta pemantauan program pemberdayaan yang secara nyata meningkatkan kemampuan pengelola. Sebaliknya, menjadi faktor penghambat apabila tidak terdapat dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi, serta pemantauan program pemberdayaan.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono(2013) adalah cara untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

1.9.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono(2013) tipe penelitian adalah cara mengelompokkan penelitian berdasarkan tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan, dan kondisi objek yang diteliti. Tipe penelitian ini membantu peneliti menentukan bagaimana penelitian dilakukan, data apa yang dikumpulkan, serta bagaimana data tersebut dianalisis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono(2013) adalah penelitian yang dilakukan pada untuk memahami suatu fenomena secara mendalam, dengan peneliti sebagai alat utama pengumpul data dan hasil penelitian yang menekankan pemahaman makna, bukan angka atau perhitungan statistik. Pengumpulan data dilakukan secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada dapat berupa bentuk, lisan, aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan, karakteristik. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai *capacity building*, faktor pendukung dan penghambat, serta kondisi nyata tata kelola ekowisata di Kota Semarang.

1.9.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong(2017) adalah memberikan batasan pada studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga peneliti akan lebih fokus dalam menghadapi masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Jadi, fokus penelitian dimaksudkan untuk observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus

membatasi penelitian memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.

Fokus dalam penelitian ini adalah *capacity building* yang dilakukan oleh Pokdarwis Kota Semarang dalam tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal. Fokus tersebut meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan lokal, serta bentuk koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata. Selain itu, penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *capacity building* dalam tata kelola ekowisata Pokdarwis Kota Semarang.

1.9.3 Fenomena Penelitian

Menurut Sugiyono(2013), dalam penelitian kualitatif penelitian berangkat dari fenomena, yaitu gejala, peristiwa, atau kondisi nyata yang terjadi di lapangan dan menimbulkan pertanyaan penelitian. Fenomena ini dapat berupa masalah, ketimpangan, proses sosial, perilaku, atau praktik tertentu yang diamati peneliti dalam kondisi alamiah.

Fenomena dalam penelitian ini adalah belum optimalnya *capacity building* Pokdarwis Kota Semarang dalam tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal, meskipun sektor pariwisata dan ekowisata di Kota Semarang menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan. Fenomena ini tercermin dari adanya perbedaan tingkat perkembangan pengelolaan antar destinasi ekowisata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lokal, serta belum terbangunnya koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan

dalam pengelolaan ekowisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa *capacity building* yang diterapkan belum berjalan secara merata dan terintegrasi pada seluruh destinasi ekowisata di Kota Semarang.

Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena keberhasilan tata kelola ekowisata berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan lokal, serta peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan penggerak. Melalui analisis terhadap fenomena ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pelaksanaan *capacity building*, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal yang berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat melalui fenomena berikut :

Tabel 1.4 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub-fenomena	Gejala	Deskripsi	Interview Guide
<i>Capacity Building</i> Pokdarwis Kota Semarang dalam Tata Kelola Ekowisata berbasis Masyarakat Lokal	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Rekrutmen	Mengidentifikasi bagaimana masyarakat lokal mulai terlibat sebagai pengelola ekowisata.	Bagaimana proses keterlibatan dan rekrutmen masyarakat lokal sebagai pengelola ekowisata di Kota Semarang?
		2. Pelatihan dan Pendidikan	Upaya peningkatan kemampuan pengelola dan masyarakat melalui program pelatihan, keberlanjutan pelaksanaan, pihak penyelenggara, sasaran peserta, dan dampaknya terhadap	Bagaimana pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan dalam meningkatkan kapasitas pengelola?

Fenomena	Sub-fenomena	Gejala	Deskripsi	Interview Guide
			peningkatan kemampuan kerja.	
		3. Praktek dan Pengalaman Kerja	Menganalisis sejauh mana pengelola memperoleh pengalaman untuk menjadi sarana praktik di lapangan dalam praktik pengelolaan ekowisata	Bagaimana dampak dari pendidikan dan pelatihan yang didapatkan untuk praktik dan pengalaman kerja pengelolaan ekowisata?
	2. Penguatan Organisasi	1. Sistem Insentif	Mengidentifikasi bentuk pemberian insentif kepada pengelola ekowisata, dilihat dari pembagian manfaat ekonomi, , keterbukaan pengelolaan insentif, dan dampaknya terhadap motivasi dan kinerja pengelola.	Bagaimana mekanisme pembagian sistem insentif dalam pengelolaan ekowisata sebagai pemendorong motivasi kinerja pengelola?
		2. Kepemimpinan	Menganalisis peran pimpinan atau penggerak kelompok dalam mengoordinasikan kegiatan, mengambil keputusan, dan menjalin hubungan dengan pemerintah daerah.	Bagaimana peran kepemimpinan dalam mengoordinasikan kegiatan, pengambilan keputusan, dan hubungan dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan ekowisata?
		3. Budaya Organisasi	Menganalisis nilai, norma, dan kebiasaan kerja dalam organisasi pengelola, khususnya terkait kerja sama, gotong royong, kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan,	Bagaimana nilai, norma, dan kebiasaan kerja yang berkembang dalam organisasi pengelola ekowisata, khususnya terkait kerja sama dan kepedulian lingkungan?

Fenomena	Sub-fenomena	Gejala	Deskripsi	Interview Guide
			serta partisipasi anggota dalam kegiatan wisata.	
		4. Komunikasi	Menganalisis pola komunikasi dan koordinasi internal organisasi pengelola serta hubungan komunikasi dengan pemerintah daerah Kota Semarang dan eksternal.	Bagaimana pola komunikasi dan koordinasi internal organisasi pengelola serta komunikasi dengan pemerintah daerah?
		5. Sistem SDM	Pengelolaan sumber daya manusia dalam pengaturan kerja organisasi pengelola.	Bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi pengelola ekowisata, meliputi pembagian tugas, jadwal kerja, dan evaluasi kinerja?
	3. Reformasi Kelembagaan	1. Kebijakan yang Berlaku	Dukungan kebijakan atau regulasi yang berlaku, pola koordinasi antar perangkat daerah, dan kelembagaan baik secara internal maupun diluar kelembagaan lokal.	Bagaimana dukungan kebijakan daerah maupun regulasi internal dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat?
Faktor Pendukung dan Penghambat <i>capacity building</i> Pokdarwis Kota Semarang dalam tata kelola ekowisata	1. Dukungan Pemerintah	Kebijakan, program, dan fasilitasi pemerintah	1. Pendukung: Adanya program pelatihan, pembinaan, monitoring dari pemerintah. 2. Penghambat: Program pelatihan dan pembinaan,	Bagaimana bentuk dukungan pemerintah dalam kebijakan, program, pelatihan, dan pendampingan terhadap pengelolaan ekowisata?

Fenomena	Sub-fenomena	Gejala	Deskripsi	Interview Guide
berbasis masyarakat lokal			tidak berkelanjutan.	
	2. Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat lokal	1. Pendukung: Masyarakat aktif dalam pengelolaan, pembagian tugas, dan kegiatan organisasi pengelola. 2. Penghambat: Partisipasi pasif, kurang terlibat dalam organisasi, dan bergantung pada pemerintah.	Bagaimana partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata?
	3. Keterlibatan Komunitas	Bentuk kerja sama dan pendampingan dari pihak luar	1. Pendukung: Adanya pendampingan, pelatihan, dan kerja sama dengan pemerintah, kampus, swasta, atau komunitas. 2. Penghambat: Pengelolaan berjalan sendiri tanpa dukungan dan pembinaan dari pihak luar.	Bagaimana bentuk kerja sama dan pendampingan pihak eksternal serta dampaknya terhadap pengelolaan ekowisata?
	4. Pemanfaatan dan Program Pemberdayaan	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan kegiatan pemberdayaan terhadap pengelola	1. Pendukung: Adanya monitoring, evaluasi, dan program pemberdayaan yang meningkatkan kemampuan pengelola. 2. Penghambat: Tidak ada evaluasi pembinaan sehingga tidak	Bagaimana pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan program pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas pengelola ekowisata?

Fenomena	Sub-fenomena	Gejala	Deskripsi	Interview Guide
			berdampak pada praktik Pengelolaan.	

Sumber : Diolah oleh penulis(2026)

1.9.4 Lokus Penelitian

Lokus atau lokasi penelitian adalah tempat diadakannya sebuah penelitian atau observasi dalam rangka untuk memperoleh sebuah data yang akurat untuk sebuah penelitian (Sugiyono,2013).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, dengan lokus penelitian yaitu Pantai Tirang dan Ekowisata Mangrove Tapak Tugurejo dipilih sebagai lokasi penelitian ekowisata perkotaan karena memiliki karakteristik konservasi lingkungan serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaannya.

1.9.5 Sumber Data

1.9.5.1 Data Primer

Menurut Sugiyono(2013), data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama untuk memperoleh informasi melalui proses pengumpulan data seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau pengukuran langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal di Kota Semarang.

1.9.5.2 Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono(2013) merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui

pihak lain atau dokumen yang telah tersedia sebelumnya, seperti laporan, arsip, buku, jurnal, peraturan, dan data statistik. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder seperti buku, skripsi, jurnal, dokumen, berita, serta website terkait fenomena penelitian mengenai. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan untuk mendukung *capacity building* Pokdarwis Kota Semarang dalam tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal. Data diperoleh dari buku, literatur ilmiah, karya ilmiah, dokumen kebijakan dan peraturan daerah, laporan resmi instansi pemerintah, serta berita media dan situs resmi terkait.

1.10 Pemilihan Informan

Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, Patton (2002) menyebutnya dengan *purposeful sampling*, yaitu memilih kasus yang informatif (*information-rich cases*) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumber daya studi (Heryana, 2018).

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2013) teknik penentuan informan yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari jumlah informan yang sedikit dan berkembang berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya hingga data yang diperoleh mencapai kejenuhan. Dalam penelitian ini, menggunakan *snowball* karena informan belum dapat ditentukan secara pasti sejak awal kemudian informan berkembang sesuai topik penelitian. Penelitian ini diawali dengan menentukan *key informant* yaitu kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

1.11 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen utama. Peneliti memiliki peran sebagai *human instrument* dalam menentukan fokus, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif memiliki ciri masalah dan data yang dicari saat awal belum jelas. Rencana penelitian bisa berubah setelah peneliti mulai berada di lapangan. Lincoln & Guba (1986) menegaskan bahwa manusia adalah instrumen terbaik dalam penelitian kualitatif, dan instrumen tambahan baru bisa dibuat setelah data awal mulai terkumpul. Nasution (1988) juga menyatakan bahwa karena banyak hal masih belum pasti di awal, maka hanya peneliti yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan.

Dengan demikian, pada tahap awal penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen utama. Setelah fokus semakin jelas, berkembang sebagai instrumen tambahan yaitu seperti pedoman wawancara, lembar observasi untuk membantu peneliti pengumpulan data, dan keterlibatan peneliti langsung dari awal hingga akhir penelitian.

1.12 Teknik Pengumpulan Data

1.12.1 Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2013) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden atau informan melalui proses tanya jawab, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan tujuan menggali data yang lebih mendalam.

Proses wawancara dimulai melalui *key informant*, yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, yang dipilih sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman menyeluruh terkait pengelolaan ekowisata. Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi dari informan kunci, peneliti memperoleh informan lanjutan yang meliputi pengelola ekowisata, kelembagaan lokal yang terlibat langsung atau terdampak oleh aktivitas ekowisata. Melalui teknik wawancara ini, peneliti diharapkan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan *capacity building*, peran masing-masing aktor, serta faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal.

1.12.2 Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi menurut Sugiyono(2013) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data mengenai perilaku, peristiwa, kondisi, atau proses yang sedang berlangsung dalam kondisi alamiah. Observasi digunakan ketika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal, yang meliputi aktivitas pengelolaan destinasi, keterlibatan masyarakat lokal dalam pelayanan dan kegiatan pendukung ekowisata, pola interaksi antara pengelola, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta kondisi sarana prasarana dan lingkungan kawasan ekowisata. Observasi ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi *capacity building*, tingkat partisipasi masyarakat, serta

faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ekowisata di Kota Semarang.

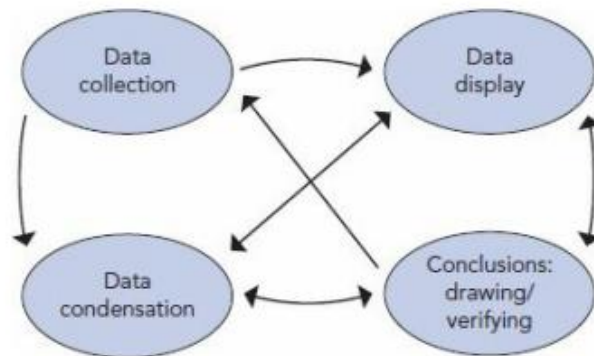
1.12.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono(2013) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat atau mengumpulkan data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen, seperti tulisan, gambar, arsip, catatan resmi, foto, laporan, maupun rekaman yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait pengelolaan dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat lokal di Kota Semarang. Dokumen yang dianalisis meliputi kebijakan dan peraturan daerah, laporan program pengembangan ekowisata, arsip kelembagaan pengelola, serta dokumentasi kegiatan di lokasi penelitian. Data tersebut dimanfaatkan untuk menganalisis *capacity building*, penguatan kelembagaan, serta faktor pendukung dan penghambat tata kelola ekowisata berbasis masyarakat lokal.

1.13 Teknik Analisis Data

Proses analisis data fokus pada saat proses dilakukan di lapangan seiring dengan pengumpulan data menyatakan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkesinambungan dan interaktif sampai tuntas. Kegiatan yang terlibat dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan (Miles et al., 2014).



Sumber : (Miles et al., 2014)

Gambar 1.6
Teknik Analisis Data oleh Miles dan Huberman

1.13.1 Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi informasi dari berbagai sumber untuk memperkuat data penelitian. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian dan bertujuan untuk menyusun data sehingga menghasilkan kesimpulan, menggunakan teknik seperti penulisan ringkasan, pengkodean, dan pengembangan tema untuk memisahkan data yang relevan dari yang tidak relevan.

1.13.2 Penyajian Data (*Display Data*)

Aktivitas analisis data yang kedua yaitu penyajian data (*Display Data*). Penyajian data adalah kumpulan data atau informasi terorganisir yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, lalu disusun dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data dapat berbentuk matriks, diagram, tabel, dan bagam. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif.

1.13.3 Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Proses terakhir dalam analisis data adalah Menggambarkan Data dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*). Kesimpulan awal mungkin belum jelas, tetapi dengan penambahan data hasil penelitian, maknanya menjadi lebih terang. Data yang dikumpulkan, seperti dari wawancara dan dokumentasi, harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan melalui kondensasi dan penyajian ulang data (*data display*) untuk memastikan kesimpulan yang sesuai dan relevan dengan rumusan masalah. Kesimpulan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi yang didasarkan pada data lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.14 Validitas Data

Menurut Sugiyono(2013), pada penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan salah satu metode untuk melakukan keabsahan atau validitas data. Menurut William Wiersma 1986 dalam Sugiyono (2013) , triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi menurut sugiyono dibagi menjadi 3, yaitu :

1.14.1 Triangulasi Sumber

Pada triangulasi ini dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Pengujian ini bertujuan untuk melihat konsistensi, perbedaan, maupun kekhasan informasi yang diperoleh dari masing-

masing sumber.

1.14.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pengecekan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara, misalnya, kemudian diverifikasi dengan hasil observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Dengan cara ini, peneliti bisa mendapatkan data dengan hasil yang berbeda namun dengan maksud yang sama, hanya terdapat perbedaan sudut pandang. Sehingga pengujian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kredibel.

1.14.3 Triangulasi Waktu

Pada teknik ini pengecekan data dilakukan menggubakan metode yang sama seperti wawancara, observasi dan dokumentasi dengan waktu yang berbeda. Apabila ditemukan perbedaan hasil, pengumpulan data dilakukan secara berulang atau dibandingkan antar peneliti hingga diperoleh kepastian data. Teknik ini waktu menjadi faktor utama dalam kredibilitas data.

Dalam penelitian ini, validitas data dibatasi hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, Hal ini karena keterbatasan waktu dan tenaga oleh peneliti. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, pandangan, dan pengalaman para informan. Triangulasi sumber digunakan untuk memperoleh berbagai sudut pandang dari informan yang memiliki peran dan pengalaman berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan

untuk memastikan kebenaran data melalui lebih dari satu metode pengumpulan data. Sementara itu, triangulasi waktu tidak digunakan karena teknik ini memerlukan pengecekan data kembali pada waktu yang berbeda dalam rentang tertentu, misalnya beberapa bulan setelah pengumpulan data awal, untuk melihat konsistensi informasi. Dalam penelitian ini, pengecekan ulang tersebut tidak dilakukan karena keterbatasan waktu penelitian, sehingga triangulasi waktu tidak menjadi bagian dari uji validitas data.